

**PELAKSANAAN PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PONOROGO
UNTUK KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

TESIS



Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI AKBAR
NIM 50120020**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

PELAKSANAAN DAUR ULANG SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PONOROGO UNTUK KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

ABSTRAK

Daur ulang sampah menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan konsumsi global terhadap lingkungan. Dalam konteks tersebut upaya untuk mendaur ulang bahan-bahan bekas menjadi produk yang dapat digunakan kembali, serta pemisahan sampah yang efektif dan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan, Selain itu edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan dari upaya daur ulang sampah dan memberikan dampak untuk perekonomian masyarakat.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan daur ulang sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Ponorogo dan dampaknya terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali informasi tentang sistem pengelolaan sampah yang ada dan keterlibatan masyarakat, hasil penelitian ini bersumber dari wawancara aktivis lingkungan ponorogo, petugas dan tenaga kontrak Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan yang berasal dari undang-undang pemerintah yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan sampah dimana kebijakan tersebut mampu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan daur ulang dalam bentuk pemilhan sampah hal ini memiliki faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi program daur ulang, adanya dukungan disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas infrastruktur dan perizinin kerjasama dengan lembaga swasta yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tersebut dan juga hasil dari, yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta berkurangnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang tidak terkelola dengan baik.

Kata Kunci : Daur Ulang , Lingkungan Hidup Ponorogo, Keberdayaan Ekonomi



IMPLEMENTATION OF PONOROGO ENVIRONMENTAL SERVICES WASTE RECYCLING FOR COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT

ABSTRACT

Waste recycling is one of the efforts made to reduce the negative impact of growing global consumption on the environment. In this context, efforts are made to recycle used materials into products that can be reused, as well as effective waste separation and a sustainable waste management system. Apart from that, educating the public about the importance of environmentally friendly waste management is also an important part in ensuring the success of these efforts. waste recycling and have an impact on the community economy.

This research analyzes the implementation of waste recycling by the Environmental Service in Ponorogo and its impact on the economic empowerment of local communities. Using a qualitative approach, this research explores information about existing waste management systems and community involvement. The results of this research come from interviews with Ponorogo environmental activists, officers and contract workers from the Ponorogo Environmental Service.

The results of the research show that there are policies originating from government legislation specifically to handle waste management where these policies are able to identify opportunities to increase community participation in recycling activities in the form of waste selection. This has supporting factors and obstacles in implementing recycling programs, there are support is due to policies from local governments in the form of infrastructure facilities and permits for collaboration with private institutions related to waste management and also the results, which can have a positive impact on the local economy and through collaboration between government, industry and society, an environment can be created. which is cleaner and healthier and reduces environmental damage caused by waste that is not managed properly.

Keywords: Waste Recycling, Ponorogo Environment, Economic Empowerment



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Luthfi Akbar**, NIM 501220020 dengan judul: *"Pelaksanaan Program Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Untuk Keberdayaan Ekonomi Masyarakat"*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Ponorogo, 18 Oktober 2023

Pembimbing I



Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002

Pembimbing II



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP 197801122006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terskreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AL-SURV/PT/11/2016
Alamat: Jln. Pahlawan 1/6 Ponorogo 61471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461093
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Luthfi Akbar**, NIM 501220020 Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: *"Pelaksanaan Program Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Untuk Keberdayaan Ekonomi Masyarakat"*, telah dilakukan ujian tesis dan sidang Majelis Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 14 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. NIP 197502072009011007 Ketua Sidang		21-11-23
2	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. NIP 197401102000032001 Penguji Utama		20-11-23
3	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 196906241998031002 Penguji II		20-11-23
4	Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag., M.E.I. NIP 197801122006041002 Sekretaris		21-11-23

Ponorogo, 14 November 2023
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

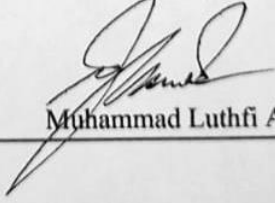
Nama : Muhammad Luthfi Akbar
NIM : 50120020
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : PELAKSANAAN PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PONOROGO UNTUK KEBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Novemb 2023

Penulis


Muhammad Luthfi Akbar

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muhammad Luthfi Akbar**, NIM 501220020, Program Magister Prodi Manajemen Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "**Pelaksanaan Program Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Untuk Keberdayaan Ekonomi Masyarakat**" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 18 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Luthfi Akbar
NIM 501220020

DAFTAR ISI

COVER DALAM	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	2
ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiError! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kebijakan Lingkungan.....	16
1. Pengertian Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Proses Kebijakan	16
3. Teori Perumusan Kebijakan	17
B. Dampak Lingkungan.....	19
1. Pengertian Dampak	19
2. Pengertian Daur Ulang	21
C. Pemberdayaan Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi	24
2. Tujuan Pemberdayaan	26
3. Indikator Keberdayaan	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31

C. Lokasi penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
H. Tahap-Tahap Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH.....	39
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo	39
B. Paparan Data tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Program Daur Ulang Sampah.....	42
C. Analisis Kebijakan dan Program Daur Ulang Sampah.....	50
BAB V FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DARI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH.....	63
A. Paparan Data tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Daur Ulang Sampah	63
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Daur Ulang Sampah.....	71
BAB VI DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT.....	82
A. Paparan Data tentang Dampak Kebijakan Pengelolaan Daur Ulang Sampah Terhadap Ekonomi Masyarakat.	82
B. Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Daur Ulang Sampah erhadap Ekonomi Masyarakat.....	92
BAB VII PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKAA.....	1033

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peristiwa alam, kegiatan pembangunan dan perilaku manusia dalam mengeksploitasi serta menggunakan sumber-sumber daya alam secara tidak seimbang seringkali dapat menimbulkan dampak adanya masalah atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu diperlukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan agar tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai penunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Manusia memiliki peran penting dalam tercapainya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Antara manusia dan lingkungan hidup tentunya memiliki hubungan yang erat karena manusia akan berinteraksi dan mempengaruhi alam dan lingkungannya sehingga timbul hubungan timbal balik baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, akan menjadi titik fokus kerja dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.²

Permasalahan sosial yang sering kali menjadi perbincangan masyarakat saat ini salah satunya yaitu sampah. Sampah merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Sebagai salah satu

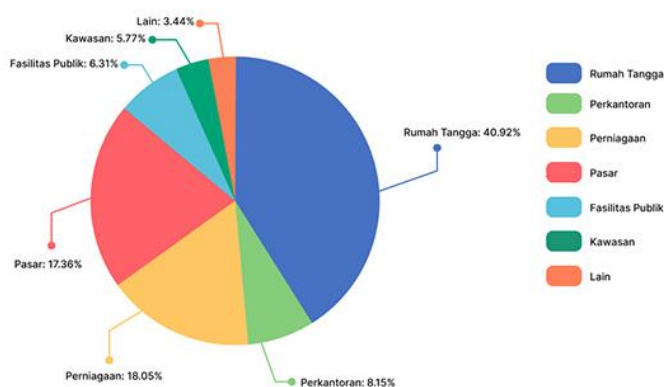
¹ Makmur Selomo, Agus Bintara Birawida, Anwar Mallongi, Muammar, Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah dalam *Jurnal MKMI*, Vol. 12 No. 4, Desember 2016

² <https://dlh.ponorogo.go.id/kinerja/dikplhd/> diakses pada tanggal 30/8/2022 pukul 19.20

negara penghasil sampah, Indonesia memiliki tantangan berat untuk dihadapi. Timbulan sampah tidak akan pernah berkurang atau habis bahkan akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat dan kompleksnya kegiatan manusia. Keberadaan sampah yang semakin hari semakin besar akan sangat mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia jika tidak segera ditangani dengan baik. Buruknya sistem pengelolaan sampah sudah tentu memberikan dampak pada lingkungan mulai dari masalah kesehatan, banjir bahkan dapat berpotensi mendatangkan bencana alam.³

Jika tidak diatasi dengan baik, masalah sampah terutama sampah plastik bisa berujung bencana alam dan kerusakan ekosistem. Salah satu faktor peningkatan volume sampah adalah karena perilaku masyarakat itu sendiri. Dimana membuang sampah sembarangan masih menjadi penyebab utama penumpukan sampah. Dalam Kehidupan Sehari-hari kebanyakan orang membuang sampah tanpa memisah terlebih dahulu sesuai dengan jenis-jenisnya. Bahkan ada orang yang membuang sampah sembarangan di sungai dan di jalan. Hal ini dapat merusak lingkungan seperti banjir. Di samping itu, penumpukan sampah terjadi karena volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH



Gambar 1.1 Data Komposisi sampah

³ Sari, Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Vol.5 No.22, 2016, hal.573–579

Beragam cara dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah menerapkan pola 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dengan melakukan cara tersebut secara terus menerus dipercaya mampu mengatasi masalah sampah. Dengan mempraktikkan reuse, kita dapat mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan mengubahnya menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Sedangkan reduce bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak terlalu diperlukan. Selain itu, dengan cara recycle, sampah-sampah yang seharusnya dibuang dapat diolah ulang menjadi bahan baku yang berguna. Seluruh upaya ini dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meminimalisir akumulasi sampah di berbagai tempat. Sebelum menerapkan pola 3R, penting untuk mengetahui jenis-jenis sampah yang ada di kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui jenis sampah yang dihasilkan, kita dapat mengelompokkannya sesuai dengan cara pengelolaan yang tepat. Sampah dapat dikelompokkan menjadi organik dan anorganik, serta dibagi lagi menjadi berbagai jenis, seperti kertas, plastik, logam, dan sebagainya. Pengetahuan ini akan memudahkan dalam proses pengelolaan sampah, termasuk proses daur ulang. Selain itu, mengetahui jenis sampah yang dihasilkan juga dapat memberikan gambaran tentang mana yang dapat diolah kembali dan mana yang perlu dikurangi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah akan semakin meningkat di masyarakat, mendorong kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan.⁴

Dalam hal ini, peranan SDM sangatlah penting untuk mengelola sampah. Sebenarnya penggunaan sumber daya manusia baik untuk kesejahteraan dirinya maupun makhluk hidup lainnya. Kesejahteraan ini terwujud manakala manusia mampu mewujudkan karya pembangunan dengan berwawasan lingkungan. Dalam sistem pembangunan, komponen sumber daya manusia merupakan unsur vital. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan keterlibatan yang aktif dari individu-individu yang terlatih dan sadar akan

⁴ [http://www.merdeka.com/Mengenal Jenis Sampah Beserta Cara Mengelolanya, Bantu Atasi Pencemaran Lingkungan | merdeka.com](http://www.merdeka.com/Mengenal_Jenis_Sampah_Beserta_Cara_Mengelolanya_Bantu_Atasi_Pencemaran_Lingkungan_|_merdeka.com) diakses 30/8/2022 pukul 19.00

tanggung jawab lingkungan mereka. Melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, masyarakat dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengelola sampah serta menerapkan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan⁵

Dalam Pengertian sumber daya manusia itu sendiri merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-banar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu⁶. Pemerintah selaku stakeholder mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, peran serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah akibat keberadaan sampah mempunyai andil besar dalam memperburuk tata kelola sampah.⁷

Dalam Peraturan Pemerintahan republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 123 ayat 5 menyebutkan bahwasanya dinas yang terkait harus mengkondisikan secara sosial, Ekonomi, Budaya yang mencakup bentuk kegiatan dibidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan air limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.⁸

Dalam Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, No. 6 Tahun 2021 pasal 2 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah harus berdasarkan tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan,

⁵ Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.10

⁷ Ika Wahyuning Widiarti, *Pengelolaan Sampah Berbasis "Zero Waste" Skala Rumah Tangga Secara Mandiri* dalam *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 4 No. 2 Juni 2012, hlm. 101

⁸ Salinan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 22 Tahun 2021. Hal 398

keamanan, bernilai ekonomi dan juga dijelaskan pada pasal 13 menerangkan bahwa :

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan sampah
 - b. pendauran ulang sampah
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
2. Pemerintah Daerah melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan
 - c. teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan
 - e. mengguna ulang dan pendauran ulang.

3. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam¹⁰

Dengan memperhatikan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo seharusnya mampu atau dapat mengatur seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan sampah, bukan hanya sebatas tata cara pengelolaan seperti pengumpulan hingga pembuangan di TPA, melainkan juga tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, serta dalam masyarakat dalam mengelola sampah.¹¹

Dalam hal ini banyak kasus yang terjadi di Ponorogo secara khusus bahwa jumlah sampah yang masuk pada 2 tahun terakhir menjadi meningkat hingga 50 %. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan serius di kalangan masyarakat dan pihak berwenang dan peningkatan jumlah sampah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu segera diatasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan penyebab utama peningkatan sampah seperti gaya

⁹ Peraturan Daerah Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 2

¹⁰ Peraturan Daerah Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 13

¹¹ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, (Jakarta : Walhi, 2003), hlm 67

hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan adanya Perubahan pola konsumsi yang cenderung menghasilkan lebih banyak sampah plastik dan bahan tidak mudah terurai menjadi salah satu kontributor utama terhadap permasalahan ini. Tidak hanya itu, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai juga turut berperan dalam meningkatnya jumlah sampah. Keterbatasan fasilitas daur ulang dan tempat pembuangan akhir yang sesuai menyulitkan upaya pengelolaan sampah secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pihak berwenang setempat diharapkan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganan masalah ini, seperti meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, menumbuhkan kesadaran lingkungan, dan meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Upaya penanggulangan sampah di Jawa Timur khususnya di kabupaten Ponorogo dilakukan dengan berbagai hal antara lain program Daur ulang sampah. Daur ulang sampah merupakan kegiatan bersifat sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Daur ulang sampah adalah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh Pemerintah Jawa Timur.

Adanya langkah tersebut diatas diwujudkan dengan daur ulang sampah di wilayah Kabupaten Ponorogo, adapun jumlah tempat daur ulang sampah yang aktif di Kabupaten Ponorogo berkisar 21 Bank sampah yang berada di tingkat desa. Dinas Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi secara rutin setiap satu bulan sekali terhadap Daur ulang sampah yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo dimana salah satu diantaranya adalah Daur ulang sampah yang ada di kabupaten ponorogo memberikan dampak baik dari perekonomian daerah. Dan dari program tersebut dapat meningkatkan kualitas kebersihan

lingkungan sekaligus mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Sampah semula dianggap tidak berguna menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang dapat mensejahterakan anggota serta masyarakat itu sendiri.¹²

Dari permasalahan di atas sangatlah menarik untuk diteliti, maka Peneliti mengambil judul Pelaksanaan Program daur ulang sampah oleh dinas lingkungan hidup ponorogo untuk keberdayaan ekonomi masyarakat (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

Dalam menyelesaikan penelitian ini, menggunakan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tentang pelaksanaan daur ulang sampah ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan daur ulang sampah ?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan pengelolaan daur ulang sampah terhadap ekonomi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kebijakan dan program daur ulang Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi pemerintah dan masyarakat.
2. Untuk mengkaji Proses Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi melalui program daur ulang di kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengkaji dampak proses pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemerintah di kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

¹² [Pengelolaan Sampah “from traces to money” melalui Daur ulang sampah – Dinas Lingkungan Hidup \(ponorogo.go.id\)](#) Diakses 30/8/2022 Pukul 19.30

- 1) Bagi studi Ekonomi Syari'ah, sebagai wawasan ilmu pengetahuan terutama pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program daur ulang sampah.
 - 2) Menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang peranan dan pengelolaan sampah pada daur ulang sampah, yang mana dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam mengembangkan penelitian tentang ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
- 1) Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan informasi pada masyarakat. Penelitian ini sebagai perwujudan penelitian di IAIN Ponorogo khususnya Program Studi Ekonomi
 - 2) Syariah, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan lembaga dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 3) Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program daur ulang sampah.

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian mengenai Pengelolaan sampah, Menurut Isrotul Muzdalifah Pengelolaan Bank Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara) menunjukkan bahwa praktek pengelolaan sampah yang dilakukan Bank Sampah Tunas Bintang Pagi dengan melibatkan potensi nasabah (masyarakat) dalam pengelolaan sampah dan menjalankan program Bank Sampah tidak terlalu signifikan. Selain bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, adanya Bank Sampah ini meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih, Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, Perbedaannya adalah penelitiannya ini tidak

menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan.¹³

Menurut Ragil Gunawan dalam judul Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sampah Rumah Tangga Melalui Kelompok Sadar Sampah “Sri Kandi” Di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Bahwasanya Hasil dari penelitian ini pengorganisasian, pendamping dan kelompok sadar sampah melakukan perubahan paradigma serta dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui kegiatan yang direncanakan serta dijalankan oleh kelompok, seperti pendidikan pengelolaan sampah, praktek pembuatan kerajinan dari sampah plastik serta musyawarah untuk kesepakatan bersama warga RT 19 agar tidak membuang sampah di sungai dan lahan lahan milik warga hal ini bertujuan untuk saling mengawasi satu sama lain agar meminimalisir pembuangan sampah di sungai dan lahan milik warga. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya kontribusi pemerintah untuk mengawasi proses daur ulang sampah.¹⁴

Pembahasan ini, juga berkaitan dengan Nurhasna dalam tulisannya yang berjudul Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare, yang menggunakan metode Kualitatif, menunjukkan bahwa Manfaat Bank Sampah Peduli Labukkang, memiliki beberapa manfaat lagi bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan menjadikan sampah yang terbuang sia-sia memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah ekonomi keluarga dan menambah silaturahmi antara masyarakat satu dengan yang lain. kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya kontribusi pemerintah untuk mengawasi proses daur ulang sampah¹⁵

¹³ Isrotul Muzdalifah, Pengelolaan Bank Smapah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara), Semarang: UIN Walisongo,2019

¹⁴ Ragil Gunawan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sampah Rumah Tangga Melalui Kelompok Sadar Sampah “Sri Kandi” Di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vo. 10 No.3 2017

¹⁵ Nurhasna, Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare, Parepare: STAIN Parepare,2017

Menurut Alfiano Arif Muhammad dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Perum Gumuk Indah, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta, dalam tulisannya menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh warga Perum Gumuk Indah terkait Bank Sampah bisa dibagi dalam dua, yakni pertama, pengetahuan yang berarti pemberdayaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru terkait persoalan sampah dengan cara memberikan suatu ketrampilan dengan hasil daur ulang sampah. Yang ke dua pemberdayaan memiliki dampak pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi yang cukup, perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan.¹⁶

Sama halnya dengan Purwanto dengan judul Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang UtaraBekasi, menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mendorongnya yaitu faktor pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha). Dukungan berasal dari masyarakat seperti tim penggerak PKK, kader lingkungan, warga masyarakat, pedagang lapak baik pabrik, pengepul barang bekas dan tukang rosok individu. Bank sampah telah memberikan manfaat kepada warga, terutama manfaat langsung dengan berkurangnya timbunan sampah, lingkungan menjadi lebih bersih dan asri, hijau, nyaman, sehat serta meningkatkan kemandirian warga secara ekonomi. Pengelolaan sampah terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga, perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan¹⁷

Menurut Roza Linda dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian

¹⁶ Alfiano Arif Muhammad, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Perum Gumuk Indah, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta, Magister Ilmu Sains, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 10

¹⁷ Purwanto, Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi, *Academics in Action Journal* Volume, Number 1,27-37,2018

Kelurahan Tangkerang Labuai)., dengan metode Kualitatif dalam penelitian Menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Berlian berjalan cukup baik. Kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Berlian telah memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat dan anggotanya antara lain manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selain manfaat sosial juga manfaat ekonomi. Kegiatan ini juga memberikan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana mengolah sampah dengan baik. perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan¹⁸

Menurut Anih Sri Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (studi kasus Bank Sampah Malang), dengan metode Kualitatif menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, telah menjadi salah satu alternative solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali. BSM dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Dengan menerapkan pola ini, volume sampah yang dibuang ke TPA diharapkan dapat berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan.¹⁹

Menurut Azelia Deskasari dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program bank sampah Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, menggunakan metode Kualitatif, menjelaskan bahwa

¹⁸ Roza Linda, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai), Jurnal Al-Istiqna, Edisi 12 Volume I, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

¹⁹ Anih Sri Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah, Jurnal Penelitian, Vol. 5, No. 10, 2014

program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui program menabung sampah, sosialisasi, dan pelatihan ketrampilan tentang pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu adanya respon positif dari masyarakat menyambut hadirnya Program bank sampah. Adanya dukungan dari pihak nasabah dan pihak eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan di Program bank sampah. Dan faktor yang menghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas, terkendalanya oleh kesibukannya masing-masing nasabah, belum adanya bantuan sarana dan prasarana dari kelurahan untuk kegiatan di Program bank sampah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan²⁰

Menurut Agung Wirnarno dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Organik Di Desa Krejengan Probolinggo, menggunakan metode Kualitatif, Hasil dari penelitian ini kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan dan pematapan pengelolaan manajemen bank sampah organik Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dimulai dengan kegiatan sosialisasi kampanye pengolahan sampah organik yang bekerjasama dengan BPP (Badan Penyuluhan Pertanian). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah khususnya sampah organik, selanjutnya masyarakat di edukasi dan diajak mempraktekkan cara pengelolaan sampah organik dengan benar yang terdiri dari beberapa macam diantaranya, sampah daun, limbah rumah tangga, dan kotoran ternak yang nantinya akan di kelola untuk menghasilkan pupuk dan pakan ternak. perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan²¹

²⁰ Azelia Deskasari, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019

²¹ Agung Winarno, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Organik Di Desa Krejengan Probolinggo, Jurnal Graha Pengabdian (E- ISSN: 2715-5714) Vol. 1, Malang: UIN Malang, 2019, hlm.63-70

Menurut Ahmad Thoriq Alfarisyi dengan judul Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam, Menggunakan metode Kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah Dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya, masyarakat menjadi sadar bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak berguna keberadaannya, sebenarnya dapat membawa sebuah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat dari sampah tersebut dapat disimpan atau ditabung oleh nasabahnya. Pemberdayaan dalam konsep islam masuk dalam tamkin. Tamkin sendiri menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kokokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat. Baik itu bersifat hissi (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung pada sangkarnya atau bersifat ma'nawi seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa, perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menganalisa dari sisi pemerintahan yang dimana pemerintahlah yang memiliki kuasa tertinggi dalam pengelolaan dan pemberdayaan.²²

Pembahasan ini, juga berkaitan dengan Nurhasna dalam tulisannya yang berjudul Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare, yang menggunakan metode Kualitatif, menunjukkan bahwa Manfaat Bank Sampah Peduli Labukkgang, memiliki beberapa manfaat lagi bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan menjadikan sampah yang terbuang sia-sia memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah ekonomi keluarga dan menambah silaturahmi antara masyarakat satu dengan yang lain. kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya kontribusi pemerintah untuk mengawasi proses daur ulang sampah²³

Secara garis besar penelitian terdahulu yang Peneliti tulis menjelaskan tentang manajemen Daur ulang sampah dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat, dampak Daur sampah terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian yang Peneliti

²² Ahmad Thoriq Alfarisyi, Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya), Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm. 541-554

²³ Nurhasna, Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare, Parepare: STAIN Parepare, 2017

lakukan adalah mengetahui apakah dinas terkait dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program daur ulang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk Memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun kerangka dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian yang dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Dan sistematis Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teoritik tentang kebijakan pengelolaan sampah oleh lingkungan hidup ponorogo untuk keberdayaan ekonomi masyarakat

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, sumber data teknik pengecekan keabsahan data teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH

Bab ini berisi data tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo untuk memproses pengelolaan sampah di Ponorogo

BAB V : FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DARI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH

Bab ini berisi data tentang faktor-faktor dilapangan yang menjadi pendukung dan penghambat yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo untuk memproses pengelolaan sampah di Ponorogo

**BAB VI : DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAUR
ULANG SAMPAH TERHADAP EKONOMI
MASYARAKAT**

Bab ini berisi data tentang hasil dampak yang berasal dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo untuk memproses pengelolaan sampah di Ponorogo

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga dilengkapi dengan daftar pusaka.



BAB II

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

A. Background Teori Kebijakan Lingkungan

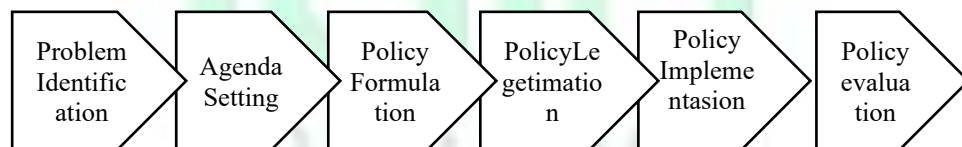
Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino terkait kebijakan lingkungan Mendefinisikan perihal kebijakan sebagai rentetan tindakan yang diajukan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam kondisi lingkungan tertentu dimana terdapat didalamnya kesulitan atau hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”²⁴

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah

Pendapat lain Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).²⁵

1. Teori Proses Kebijakan

Proses Kebijakan menurut Tomas R.Dye²⁶, sebagai berikut :



"Public policy is whatever governments choose to do or not to do"

(Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

²⁴ Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Afabeta, 2008), Hlm. 7

²⁵ M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 17

²⁶ Thomas R Dhey, Understanding Public Policy (New Jersey: Prentice Hall, 1995) Hlm. 298

dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini termasuk yang ringkas atau tidak kompleks, tetapi banyak mendapat perhatian di kalangan para ahli kebijakan untuk ditelaah. Bagi Thomas R. Dye, kebijakan publik itu harus mencakup bukan saja apa yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, aka tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Mengapa dikatakan demikian? Karena menurut Thomas R.Dye, baik yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat.

2. Teori Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis perumusan kebijakan yaitu:²⁷

- a. Teori Kelembagaan (*Institutional*)
- b. Teori Proses (*Proces*)
- c. Teori Kelompok (*Group*)
- d. Teori Elit (*Elite*)
- e. Teori Rasional (*Rational*)
- f. Teori Inkremental (*Incremental*)
- g. Teori Permainan (*Game Theory*)
- h. Teori Pilihan Publik (*Public Choice*)
- i. Teori Sistem (*System*)
- j. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning*)
- k. Teori Demokratis
- l. Teori Strategis

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan Teori Proses (*Proces*) yang dianggap sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam teori ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa daur ulang sampah merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai Proses. Untuk itu, kebijakan lingkungan merupakan juga proses yang menyertakan rangkaian kegiatan:

²⁷ H.A.R. Tillar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),Hlm,190-191.

Identifikasi Permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
Menata Agenda Formulasi Kebijakan	Memutuskan isu apa yang akan dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
Perumusan Prosal Kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
Legitimasi Kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian menjalankan program dengan sesuai tujuan dan harapan
Implementasi Kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dalam memproses program kerja
Evaluasi Kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (impact) dan kelompok

Dalam kalimat yang diberikan, terdapat penggunaan istilah "Teori Proses (Proces)" yang mungkin perlu dianalisis lebih lanjut. Terdapat juga asumsi bahwa daur ulang sampah dianggap sebagai sebuah aktivitas yang mempunyai proses. Selanjutnya, kalimat tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan juga dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan. Namun, kalimat ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki. Sebagai contoh, mungkin ada kesalahan pengejaan dalam kalimat tersebut, yaitu kata "Proces" yang mungkin seharusnya adalah "Proses". Selain itu, konteks lebih lanjut mengenai penelitian tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teori ini diaplikasikan dalam penelitian dan bagaimana asumsi-asumsi tersebut mendukung penelitian tersebut. Dengan konteks yang lebih jelas, akan lebih mudah untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.

B. Dampak Lingkungan

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Efeknya adalah daya yang ada dan muncul dari sesuatu yang ikut merubah watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh ialah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbul balik atau sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²⁸

Dampak menurut Gorys Keraf dalam Otto Soemarwoto adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.²⁹

Dampak, dalam konteksnya yang sederhana dan terjemahan yang nyata, merujuk pada efek atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan atau keputusan tertentu, mengingat bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh seorang atasan cenderung memiliki dampak tersendiri, yang bisa bersifat baik maupun buruk, memberikan bobot penting pada signifikansi dari keputusan tersebut dalam lingkup yang lebih luas. Penting untuk diingat bahwa dampak tersebut tidak hanya merupakan hasil dari tindakan itu sendiri, tetapi juga bisa terjadi secara bertahap sebagai hasil dari implementasi dari sistem pengawasan internal yang ketat, menyoroti pentingnya proses pengawasan yang terencana dan sistematis dalam memastikan bahwa dampak-dampak tersebut dapat diprediksi dan diantisipasi oleh seorang pemimpin yang berpengalaman dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dan konteks di mana keputusan tersebut diambil..³⁰

²⁸ Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widjaya Karya, hlm. 234

²⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24

³⁰ Irwan, Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 27.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Dampak positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau membantu keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjenuhkan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Dampak dalam komunikasi sosial adalah sebuah proses yang mencakup keinginan kuat untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberikan kesan kepada orang lain. Tujuan utamanya adalah agar individu-individu tersebut akhirnya mengikuti atau membantu mencapai tujuan yang diinginkan dan Positif, dalam konteks mental dan emosional, merujuk pada sikap atau suasana hati yang menekankan hal-hal yang baik dan optimis. Ini melibatkan penghormatan terhadap ketegasan pikiran dan fokus pada kegiatan kreatif yang menginspirasi. Seseorang dengan pola pikir positif cenderung melihat dunia dengan optimisme dan mencari kegembiraan daripada terjebak dalam kesedihan atau pesimisme. Secara keseluruhan, sikap positif mendorong energi yang sehat dan optimisme yang dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.³¹

Dampak negatif merujuk pada konsekuensi yang timbul dari perilaku atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan atau

³¹ F. Gunawan Suratno, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal 24.

kerugian bagi individu maupun lingkungan. Perilaku atau kegiatan yang menghasilkan dampak negatif sering kali melibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai atau standar yang diakui secara umum. Hal ini dapat berupa kegiatan yang merusak lingkungan, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, atau bahkan membahayakan kesehatan dan keamanan orang lain. Dampak negatif dapat memiliki jangkauan yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya

Dalam beberapa kasus, dampak negatif juga dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Misalnya, ketika perilaku yang merugikan menjadi norma atau kebiasaan yang diterima, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, dampak negatif dapat memengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi daya saing suatu komunitas dalam pasar global. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang dampak negatif suatu tindakan atau kegiatan penting untuk mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam masyarakat dan lingkungan kita

Jadi dapat disimpulkan dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pembangunan yang dilakukan

2. Pengertian Daur Ulang

Daur ulang adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Daur ulang memiliki arti dalam bidang ilmu kimia. Daur ulang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga daur ulang dapat menyatakan nama

dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, diantaranya:³²

- a. Peredaran ulang suatu masa.
- b. Pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti daur ulang adalah peredaran ulang suatu masa. Arti lainnya dari daur ulang adalah pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru.³³

Daur ulang bisa difahami sebagai proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.³⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daur ulang barang retur merupakan suatu kegiatan dimana melakukan pengolahan terhadap bahan baku yang sudah terpakai dalam keadaan telah rusak sehingga tidak terpakai untuk dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih bernilai dengan menciptakan produk yang sama seperti produk utama atau dengan mengolah menjadi produk pengganti yang baru, dengan menghasilkan nilai jual yang sama sebagai bahan pengganti.

Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- b. Mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam.
- c. Mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat
- d. Melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu lingkungan tertentu.

³² <https://kbbi.lektur.id/daur-ulang> diakses tanggal 1/9/2022

³³ <https://kbbi.web.id/daurulang> diakses 1/9/2022

³⁴ <https://Wikipedia bahasa indonesia,esklopedia bebas-daur-ulang.htm//> diakses tanggal 1 September 2022

- e. Menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan.
- f. Mengurangi sampah anorganik karena sampah anorganik ada yang dapat bertahan hingga 300 tahun ke depan

Dalam undang-undang republik indonesia no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 20 bahwa:³⁵

- a. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - 1) pembatasan timbulan sampah;
 - 2) pendauran ulang sampah; dan/atau
 - 3) pemanfaatan kembali sampah.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - 1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - 2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - 3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - 4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - 5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- c. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- d. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Dalam daur ulang diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan

³⁵<https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.pdf> diakses tanggal 1 September 2022

secara proporsional, efektif, dan efisien, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya, mengutip dari Sutaryono Dapat dikatakan faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang mengimplementasikan sesuatu, seperti peran teman lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu. Faktor pendukung dapat dikatakan juga sebagai motivasi untuk tetap konsisten dalam melaksanakan hal-hal tertentu.³⁶

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, Menurut Sutaryono menjelaskan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik. Menurut faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.³⁷

D. Keberdayaan Ekonomi

1. Definisi keberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keberdayaan adalah perihal berdaya. Keberdayaan berasal dari kata dasar daya.³⁸ Yang dimana memiliki kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat

³⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243

³⁷ *Ibid*, hlm 243

³⁸ kbbi.lektur.id/keberdayaan

fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

2. Konsep keberdayaan ekonomi

Aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri, penentuan nasib sendiri, bekerja dengan masyarakat, dan bukan bekerja untuk masyarakat, menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat dan Konsep pemberdayaan ekonomi suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas ekonomi individu, kelompok, atau komunitas tertentu. Pemberdayaan ekonomi melibatkan berbagai upaya, seperti pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya finansial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan teknis, dengan tujuan agar individu atau kelompok tersebut dapat lebih aktif dan efektif dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Konsep ini juga berfokus pada peningkatan aksesibilitas terhadap peluang ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk meningkatkan taraf hidup mereka.³⁹

Konsep pemberdayaan Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto Pemberdayaan adalah Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya sendiri dengan daya yang dimiliki, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi – tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “Rekayasa ” pihak luar yang seringkali mematiakan kemandirian masyarakat setempat. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh

³⁹ Sudarwan Danim, Transformasi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, April 1995), h. 56

individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginankeinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.⁴⁰

3. Tujuan keberdayaan

Tujuan utama keberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya mereka dengan lebih efektif. Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan, perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.⁴¹

Menurut George Odhiambo, "keberdayaan adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk mengendalikan dan mengubah kehidupan mereka sendiri melalui akses terhadap informasi, pendidikan, dan sumber daya untuk memberikan individu atau kelompok masyarakat alat, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang diperlukan agar mereka dapat mengambil kontrol atas kehidupan mereka, mengatasi hambatan, dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana individu atau kelompok yang sebelumnya kurang berdaya menjadi lebih mandiri, mampu membuat keputusan, mengatasi masalah, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

⁴⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato "Pemberdayaan Masyarakat dalam prespektif kebijakan Publik", (Bandung:Alfabet),hlm 39

⁴¹ Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009), h. 120

Tujuan keberdayaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari program atau inisiatif pemberdayaan. Beberapa tujuan umum dari pemberdayaan termasuk:

- a. Meningkatkan kemandirian: Meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengatasi tantangan dan masalah mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal.
- b. Meningkatkan akses dan kontrol: Memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya, pengetahuan, dan kesempatan, serta memberdayakan individu atau kelompok untuk mengendalikan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
- c. Meningkatkan kualitas hidup: Meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok dengan memberdayakan mereka untuk mencapai kesejahteraan fisik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.
- e. Mengurangi ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik antara individu atau kelompok yang berbeda.

Pemberdayaan dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Tujuan utamanya adalah memberikan alat dan peluang kepada individu atau kelompok untuk mencapai potensi mereka dan memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri.⁴²

4. Indikator keberdayaan

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.⁴³ Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak.

⁴² Empowerment and the Dissemination of Information," *Journal of Community Development*, vol. 15, no. 2 (2018): 45-52.

⁴³ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, Cet ke-1, 2005),h. 57

Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan dan Pada operasionalnya, pemberdayaan memerlukan pemahaman yang jelas mengenai fokus dan tujuannya. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap berbagai indikator keberdayaan yang dapat mengungkap apakah seseorang telah berdaya atau belum. Dengan demikian, ketika suatu program pemberdayaan sosial dijalankan, semua usaha dapat difokuskan pada aspek-aspek yang perlu dioptimalkan dari sasaran perubahan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*).

Program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajat keberdayaan yakni:⁴⁴

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).

⁴⁴ Hairi Firmansyah (Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin) Volume 02 Nomor 02 Juni 2012

- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power with).
Dalam proses untuk keberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dihindari agar program pemberdayaan dapat berhasil dan memberikan manfaat yang maksimal. Berikut beberapa kelemahan yang harus dihindari:⁴⁵
- e. Ketidakberlanjutan: Salah satu kelemahan utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah ketidakberlanjutan program. Jika program hanya bersifat jangka pendek dan tidak didukung dengan rencana jangka panjang, maka manfaatnya akan cepat sirna setelah program berakhir.
- f. Ketidakpartisipasian Masyarakat: Pemberdayaan ekonomi yang sukses memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang akan diberdayakan. Jika masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, maka program tersebut cenderung gagal.
- g. Tidak Mengidentifikasi Masalah yang Sesungguhnya: Penting untuk memahami masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat target sebelum merancang program pemberdayaan. Salah mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dapat menyebabkan sumber daya terbuang dengan sia-sia.
- h. Tidak Menyesuaikan dengan Keadaan Lokal: Setiap komunitas memiliki karakteristik unik. Menerapkan pendekatan yang sama untuk semua komunitas tanpa mempertimbangkan perbedaan lokal dapat menghambat keberhasilan program.
- i. Tidak Memperhitungkan Aspek Sosial dan Budaya: Pemberdayaan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam komunitas. Tidak memahami atau menghormati nilai-nilai budaya lokal dapat menciptakan ketegangan dan hambatan.
- j. Kurangnya Akses ke Sumber Daya dan Pelatihan: Program pemberdayaan harus menyediakan akses yang memadai ke sumber

⁴⁵ Mohammad Abdul Aziz, "Modal Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso", (Skripsi: IAIN Jember, 2018).

daya, pelatihan, dan modal yang diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi mereka. Kurangnya dukungan ini dapat membuat program tidak efektif.

- k. Tidak Memperhitungkan Lingkungan: Pemberdayaan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik yang berkelanjutan.
- l. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi: Tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan program dapat membuat sulit untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak. Monitoring dan evaluasi yang baik penting untuk membuat perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
- m. Tidak Mengatasi Ketimpangan: Pemberdayaan ekonomi seharusnya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Jika program tidak memperhitungkan ketimpangan yang ada, maka ketimpangan dapat semakin memburuk.
- n. Tidak Mengakomodasi Perubahan: Ekonomi dan keadaan sosial selalu berubah. Program pemberdayaan harus dapat mengakomodasi perubahan ini dan tetap relevan seiring waktu.

Dalam merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penting untuk mempertimbangkan semua faktor di atas agar program tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan efektif bagi masyarakat yang menjadi sasarannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Pelaksanaan daur ulang sampah Dinas Lingkungan Hidup ponorogo terhadap pemberdayaan ekonomi Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini, meneliti Pelaksanaan daur ulang sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup ponorogo untuk pemberdayaan ekonomi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang mana penelitian ini focus secara intensif pada satu obyek tertentu. Dan untuk data diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber.⁴⁶ Penelitian studi kasus ini cenderung meneliti unit kecil akan tetapi dengan pembahasan variable dan kondisi yang lebih besar. Studi kasus ini biasanya digunakan untuk mencari informasi dalam penelitian yang lebih besar dalam ilmu-ilmu sosial.

Data studi kasus biasanya tidak didapat hanya dari kasus yang sedang diteliti, melainkan bisa didapat dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kenal akan kasus yang sedang diteliti tersebut. Intinya adalah, data yang digunakan dalam studi kasus bisa diperoleh dari sumbermanapun, akan tetapi terbatas hanya kasus yang diteliti.⁴⁷

⁴⁶ Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm 1

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian Karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pusat dalam pengendalian lingkungan dan memegang tugas penting dalam hal pengelolaan sampah yaitu dengan adanya program daur ulang.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan daur ulang sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo terhadap pemberdayaan ekonomi Melalui Program Bank Sampah karena masalah yang diteliti memang terjadi di lokasi tersebut sehingga secara ilmiah bisa diteliti, adanya kemudahan memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto adalah “subjek dari mana data diperoleh”.⁴⁸ Maka itu sumber data adalah asal dari mana data itu menempel.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat langsung tanpa adanya perantara dari sumber dengan peneliti, atau sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung saat di lapangan.⁴⁹ Untuk pemilihan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dengan narasumber kunci yang mana peneliti akan menunjuk calon narasumber yang dinilai mengetahui masalah yang akan diteliti agar dalam penggalan data bisa tepat.

Pada penelitian ini data primenya adalah data yang didapat secara langsung dengan metode wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, dan Masyarakat yang terlibat dalam proses daur ulang.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 102.

⁴⁹ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 4

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer. Dimana data diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui perantara media atau dari pihak lain.⁵⁰ dan data yang didapat dari media tertulis seperti buku, perpu dan yang lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan penelitian ini adalah tentang peran Dinas Lingkungan Hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan daur ulang sampah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi pengumpulan data. Terdapat berbagai jenis teknik yang digunakan dalam pengumpulan data disesuaikan dengan sifat penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Bog dan Biklen yaitu:

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dari sumber saat di lapangan, data tersebut bisa berupa peristiwa, benda, rekaman atau pun gambar. Cara ini dilakukan peneliti dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian secara langsung. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data secara sistematis dengan bentuk catatan lapangan

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan sehari-hari dari lembaga. Selain itu, peneliti juga mengamati secara langsung tentang kondisi atau keadaan lapangan yang digunakan penelitian. Yang kemudian hasil observasi digunakan untuk pengambilan tindakan selanjutnya, yaitu wawancara.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak atau lebih.⁵¹ Wawancara mendalam ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara mendalam

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1991), hlm. 55

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 135

dari narasumber mengenai masalah yang diteliti. Dengan metode ini diharapkan peneliti lebih bisa mendapatkan berbagai informasi yang lebih akurat.

Untuk Langkah-langkah yang dilakukan untuk wawancara mendalam ini, peneliti terlebih dahulu akan menetapkan siapa saja narasumber yang bisa dijadikan informan. Kemudian menyiapkan pedoman atau materi wawancara, kemudian peneliti bisa melakukan wawancara secara langsung di lapangan. Setelah mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan, peneliti akan mengkonfirmasi hasil wawancara yang akan dilanjutkan dengan menulis hasil wawancara. Setelah itu peneliti akan menindak-lanjuti hasil wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian kualitatif mayoritas menggunakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Akan tetapi peneliti juga memerlukan data-data yang berasal dari dokumen, berita, foto dan atau bahan statistic guna memperkuat hasil temuan selama di lapangan.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan memanfaatkan fasilitas seperti perekam suara dan kamera guna untuk merekam kejadian atau peristiwa penting saat melakukan penelitian di lapangan. Untuk data-data yang akan dikumpulkan melalui dokumentasi adalah data yang telah dijelaskan oleh Bogdan dan Biklen, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi disini bisa berupa catatan harian dari peneliti selama penelitian, surat pribadi dan biografi. Untuk dokumen resmi yang akan dikumpulkan oleh peneliti meliputi dokumen-dokumen penunjang penelitian dari kedua Lembaga.

G. Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵²

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (*interactive model*) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Ketiga alur tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.⁵³ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian. Adapun kegiatannya antara lain seperti yang tertera dibawah ini:

a. Membuat ringkasan kontak

Ringkasan kontak dalam hal ini dimaksudkan adalah hal-hal yang berisi uraian singkat tentang hasil penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan peringkasan permasalahan-permasalahan penelitian guna menemukan jawaban yang singkat.

Setelah selesai pengumpulan data di lapangan, semua catatan lapangan itu dikumpulkan kemudian dianalisis dan dipahami serta meringkasnya. Jadi ringkasan kontak tersebut adalah lembar-lembar kertas yang berisikan serangkaian hasil pemfokusan dari ringkasan permasalahan-permasalahan mengenai suatu kontak lapangan tertentu.

b. Membuat kode

Data-data yang terkumpul melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian diperkirakan cukup banyak, sehingga untuk menganalisis data itu

⁵² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104

⁵³ Huberman A. Mikel & Miles M.B, *Qualitative Data Analisis*, (Beverly Hills: SAGE Publication, Inc, 1992), hlm 16

terlalu sulit. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat kode-kode tertentu, baik kode tentang sumber data yang diperoleh, teknik apa yang digunakan dan lain-lain.⁵⁴ Kode tersebut berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengenali dan melakukan pengecekan data.

c. **Membuat memo**

Pada saat selesai membuat kode, sering muncul isu-isu yang menjebak kepada hal-hal lain, sehingga perlu membuat catatan refleksi dan memo. Memo merupakan suatu tulisan yang diteorikan dari gagasan tentang kode-kode dan hubungannya saat gagasan itu ditemukan oleh penganalisa selama pengkodean seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Huberman.

2. Penyajian Data

Di dalam penelitian ini, data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, proses penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan- kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.⁵⁵ Dalam tahapan analisis data ini penulis berusaha untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi selamapenelitian berlangsung. Dalam tahap ini

⁵⁴ Ibid, lm.19.

⁵⁵ Ibid., hlm 176-177.

diharapkan dapat menjawab semua masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan keabsahan data. Dalam melakukan pengecekan data, peneliti menerapkan teknik berikut:

1. Trianggulasi

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data”. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya.

Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang dapat teruji kebenarannya bilamana dibandingkan data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.

Oleh karena itu untuk meminimalisir dan menjaga keabsahan data, peneliti akan melakukan beberapa cara:⁵⁶

- a. Trianggulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pencocokan data yang diperoleh melalui beberapa sumber lain yang terkait.
- b. Trianggulasi Teknik, yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan Teknik yang berbeda dalam perolehan data di lapangan. Seperti apabila data diperoleh dengan cara wawancara, maka dapat dilakukan pengecekan dengan observasi langsung di lapangan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 127

- c. Triangulasi waktu, dan untuk pengujian ini dilakukan dengan cara pencocokan data yang telah diperoleh dengan carawawancara, observasi maupun dokumentasi dalam waktu dan atau situasi yang berbeda.

2. Memperpanjang Keikutsertaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci, maka keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan wawancara tentunya tidak dilakukan dengan waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian.



BAB IV

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup biasanya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang, dan unit-unit kerja yang bertugas dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas.⁵⁷ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

1. Tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. **Pengelolaan Lingkungan Hidup:** Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan di wilayah Ponorogo yang terbagi menjadi 21 kecamatan 279 desa, Tugas ini meliputi pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah. Penyusunan Kebijakan: Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup di daerahnya. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup serta perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
- b. **Penegakan Hukum Lingkungan:** Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

⁵⁷ Bambang Wintoko, Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm, 65

⁵⁸ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo 2022, hlm, 95

Tugas ini meliputi pengawasan terhadap pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, serta tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

- c. Penyuluhan dan Pendidikan Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup juga bertugas memberikan penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat. Hal ini diarahkan pada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- d. Pengawasan Izin Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup juga bertugas dalam pengawasan pemberian izin lingkungan. Tugas ini meliputi pengevaluasian dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan, serta memberikan rekomendasi terhadap pemberian izin lingkungan.
- e. Koordinasi dengan Instansi Lain: Dinas Lingkungan Hidup juga bertugas dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diarahkan pada tercapainya sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo (DLH) merupakan instansi yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang struktur organisasinya tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam struktur organisasi DLH Ponorogo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
- b. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
- c. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
- f. UPTD Pengelolaan Sampah

3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Dinas lingkungan Hidup Ponorogo

Visi Kabupaten Ponorogo 2021-2026:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT” (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Taqwa)

Misi Kabupaten Ponorogo:

- a. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
- c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

5. Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo beralamat di jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.

B. Paparan Data Tentang Kebijakan Dan Program Daur Ulang Sampah

Seiring perkembangan waktu dan perkembangan kebijakan pemerintah, pada tahun 2016 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan syarat dan indikator untuk Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait kebijakan dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, penghargaan tersebut dinamakan Nirwasita Tantra yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setiap tahunnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Indonesia. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S156/Setjen/Datin/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017, Dokumen SLHD berganti nama menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Atas dasar uraian tersebut, Terbit Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yang dimana penelitian ini masuk kedalam devisi Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan yang mana memiliki Program sebagai berikut:⁵⁹

1. Melaksanakan kegiatan penghijauan dan pemeliharaan di lingkungan TPA sampah
2. Melaksanakan pengolahan sampah dan air lindi atau leachate (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di TPA sampah
3. Mencatat, mengadministrasikan dan menimbang jumlah volume sampah yang masuk ke dalam TPA Sampah
4. Mengkoordinir pengamanan TPA sampah
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program tetap (protap) pembuangan sampah, yang meliputi jam buang,
6. pengaturan zona buangan dan pengaturan kendaraan masuk
7. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang TPA Sampah
8. Pelaksanaan kebijakan teknis TPA Sampah

⁵⁹ <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/tpa/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan TPA Sampah
10. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA Sampah
11. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di TPA sampah
12. Pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan dan pemeliharaan TPA sampah
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Pembahasan tentang pengelolaan sampah juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, No. 6 Tahun 2021 pasal 2 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah harus berdasarkan tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, bernilai ekonomi dan juga dijelaskan pada pasal 13 menerangkan bahwa :

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan sampah
 - b. daur ulang sampah
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
2. Pemerintah Daerah melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan
 - c. teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan
 - e. mengguna ulang dan daur ulang.
3. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Daerah Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 13

Dengan memperhatikan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo seharusnya mampu atau dapat mengatur seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan sampah, bukan hanya sebatas tata cara pengelolaan seperti pengumpulan hingga pembuangan di TPA, melainkan juga tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, serta dalam masyarakat dalam mengelola sampah

Untuk memahami kebijakan dan program daur ulang sampah maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap bagaimana pengelola daur ulang sampah dan melakukan observasi dan dokumentasi, maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dalam kebijakan pengelolaan sampah

Dalam menuntaskan permasalahan sampah yang ada di Ponorogo Dinas lingkungan hidup memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan program dan kebijakan pengelolaan sampah dari yang bisa dikelola masyarakat sampai yang tidak bisa dikelola masyarakat seperti limbah-limbah berbahaya yang berasal dari perusahaan yang berada di Ponorogo seperti yang disampaikan oleh bapak Riza selaku kepala koordinator Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan:⁶¹

“Untuk Limbah yang bersal dari perusahaan kayak rumah sakit mas, dari dinas memberikan peraturan dalam pengelolaannya seperti harus memiliki izin dari pemerintahan daerah untuk penyimpanan dan pengelolaan dan kalau perusahaan seperti pabrik-pabrik harus ada juga berizinan untuk pembuangan dan pengelolaannya ”

Sama halnya yang disampaikan oleh bu Sita sebagai salah satu staff koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan :⁶²

“kalau untuk limbah memang ndk semua masyarakat yang mengelola mas, tapi ada masyarakat yang sedikit resah dengan adanya bau yang berasal dari pabrik apalagi seperti pabrik tahu, dan alhamdulillahnya setelah kami berikan pelayanan perizinan akhirnya kita sudah selesaikan”

⁶¹ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁶² Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) Wawancara, Ponorogo 25 September 2023

Dari hasil wawancara tersebut adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup untuk memfasilitasi tempat penyimpanan bahan B3 yang tidak dapat dikelola oleh masyarakat pada umumnya dan Berikut daftar perusahaan yang sudah memiliki izin penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor Sk
1	RSU Griya Waluya	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/2690/405.26/2016
2	RSU Muslimat Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/2910/405.26/2016
3	PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk	Pengolahan Tepung Tapioka	Penyimpanan	188.45/2912/405.26/2016
4	PT. Darmayu Puri Kencana	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/1739/405.25/2017
5	PT. Batara Agro	Pabrik Pupuk	Penyimpanan	188.4/001/405.25/2017
6	RSU Muhammadiyah Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.4/001/405.25/201
7	Pabrik Minyak Kayu Putih Sukun	Penyulingan Minyak Atsiri (Minyak Kayu Putih)	Penyimpanan	188.4/10/405.25/2019
8	PT. Pembangkit Jawa Bali Unit pembangkit Brantas (PLTA Ngebel)	Ketenagalistrikan	Penyimpanan	188.4/11/405.25/2019
9	PT. Buanakarya Suryapratama	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Lpg	Penyimpanan	188.4/12/405.25/2019
10	RSUD Dr. Harjono Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.4/13/405.25/2019
11	PT. Prima Maesa Putra	Pabrik Es	Penyimpanan	188.4/05/405.25/2020
12	PT. Mitra Pinasthika Mustika, TBK	Perdagangan sepeda motor baru, suku cadang, dan	Penyimpanan	188.4/04/405.25/2020

		bengkel sepeda motor honda		
13	Yayasan Chania Annabila Zahiroh(Klinik Nazifa)	Aktivitas Poliklinik Swasta Penyimpanan	Penyimpanan	503/01/IPLB3/405.16/2020
14	Pabrik Gondorukem dan Terpentin PGT.	Sukun Pabrik Gondorukem dan Terpentin	Penyimpanan	DPMPTS
15	Klinik Utama Ultra Medica	Fasilitas Pelayanan esehatan	Penyimpanan	DPMPTSP
16	RSU Aisyiah Diponegoro Rumah	Sakit Umum Penyimpanan	Penyimpanan	DPMPTSP
17	CV. Cahaya Bersama Sukses (Larissa Aesthetic Center)	Klinik Kecantikan	Penyimpanan	DPMPTSP

Dari tabel diatas dijelaskan harus adanya perizinan penyimpanan agar semua sampah bisa terkoordinasi dengan baik sehingga semua aktifitas pengelolaan limbah berbahaya aman dari pencemaran lingkungan yang bisa merugikan masyarakat disekitarnya.



Gambar 4.1 DLH Verifikasi Lapangan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Di Pt Buana Karya Surya Pratama Ponorogo

Dari wawancara dan dokumen diatas kita bisa menyimpulkan bahwa sampah yang di kategorikan sebagai limbah B3 atau yang

berbahaya sudah ada penganan langsung dari pemerintah kabupaten terkhusus oleh dinas lingkungan hidup yang dimana sudah menemukan titik terang dalam pengeloannya.

Dalam penelitian ini kita berfokus kepada pengelolaan sampah yang dapat dikelola oleh masyarakat karena sampah yang menumpuk kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga atau yang berasal dari tempat hiburan oleh karena itu dinas lingkungan hidup memberikan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak riza selaku kepala koordinator Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan:⁶³

“Untuk Kebijakan pelaksanaan daur ulang sampah di Ponorgo pada intinya mas, memiliki beberapa tujuan utama. Yang Pertama, kami ingin mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan mengembangkan industri daur ulang yang berkelanjutan di Ponorogo.”

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu staff koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik yang bernama Ibu sita:⁶⁴

“Salah satu Kebijakan DLH berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah. Juga berusaha untuk memberikan edukasi dan wadah kepada warga untuk lebih aktif dalam daur ulang sampah.”

Bedasarkan wawancara diatas, Dari pernyataan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis terkait kebijakan pelaksanaan daur ulang sampah di Ponorogo yaitu adanya tujuan yang sangat bagus dalam pengerangan sampah di tempat pengbuangan akhir,

⁶³ Riza (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan), wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁶⁴ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

Pemerintah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah mandiri.

2. Menata formulasi kebijakan pengelolaan sampah

Untuk menetapkan kebijakan yang kongkrit pemerintah daerah atau dinas lingkungan hidup Ponorogo harus memiliki tahapan seperti fokus dalam menata formulasi kebijakan pengelolaan, seperti yang dinyatakan oleh bapak Riza selaku Koordinator dalam pengelolaan sampah⁶⁵

“Berkaitan hal ini mas kita memiliki Fokus utama dalam menata formulasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah kami kita berusaha untuk mengadopsi teknologi yang memudahkan kita untuk proses pengelolaan sampah dan juga memberikan pendidikan masyarakat yang efektif, serta kemitraan yang kuat antara , sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan”

Sama halnya dijelaskan oleh staff dinas lingkungan hidup bagian pengelolaan sampah mengenai tahapan dalam penataan formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Ponorogo

“Kami juga melibatkan komunitas dalam proses pengelolaan sampah yang berada di setiap desa yang terdata sebagai pengelola bank sampah, sekaligus menyelenggarakan kampanye kesadaran lingkungan, serta mendirikan program insentif bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah”

Untuk merancang formulasi kebijakan ini tentunya harus disandingkan dengan rencana jangka panjang, terkait hal ini juga di sampaikan oleh bapak Riza:⁶⁶

“Rencana jangka panjang kami termasuk memperkuat sarana dan prasarana daur ulang dan pengelolaan sampah, memaksimal kan dengan teknologi inovatif yang sudah mulai kami lakukan di PDU, dan berfokus pada upaya edukasi yang

⁶⁵ Riza (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan), wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁶⁶ Riza (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan), wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab”

Bedasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa menentukan formula dalam menindak lanjuti sebuah kebijakan sangat dibutuhkan karena terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk kemudian harinya.

3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Dengan adanya penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan formulasi dalam pelaksanaan kebijakan peneliti menanyakan bagaimana implementasi kebijakan dan langkah konkret apa yang di ambil, dalam hal ini peneliti menanyakan kepada Bapak riza: ⁶⁷

“Ya, tentunya pemerintah daerah memiliki rencana konkret untuk terus meningkatkan kebijakan ini di masa depan. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah melihat dampak positif dari kebijakan yang telah diimplementasikan, namun kami menyadari bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pakar terkait, guna mengidentifikasi area-area potensial yang memerlukan perbaikan.

Salah satu fokus utama rencana kebijakan kami di masa depan adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan saat ini. Kami berupaya untuk memperkuat sarana, prasarana dan infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan, seperti sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih teratur. Selain itu, kami juga berencana untuk lebih memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkhusus bagi yang tergabung dalam bagian bank sampah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

⁶⁷ Riza (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan), wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

Selain itu, kami sedang mengkaji dan merencanakan langkah-langkah baru yang akan memperkuat dampak positif kebijakan ini pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kami berharap dengan adanya langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat semakin mendekati diri pada tujuan utama kami untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi semua warga di wilayah kami.”

Dari Jawaban tersebut mampu mencerminkan sikap yang proaktif dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kebijakan pemerintah daerah di masa depan. Dengan menyebutkan langkah-langkah konkret yang akan diambil, seperti memperkuat infrastruktur pemantauan dan evaluasi, serta memberdayakan partisipasi masyarakat, jawaban tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan yang ada. Selain itu, penekanan pada manfaat yang diharapkan untuk masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Evaluasi dalam pengelolaan kebijakan daur ulang sampah

Dalam dunia yang semakin sadar akan lingkungan, upaya untuk mengelola sampah dengan lebih efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Kebijakan daur ulang sampah merupakan salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. Namun, seperti halnya dengan kebijakan lainnya, evaluasi terhadap efektivitasnya menjadi krusial untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi lingkungan kita.

Untuk itu pentingnya membahas bagaimana proses evaluasi ini yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan kebijakan daur ulang sampah, serta bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kebijakan di masa mendatang, menanggapi pernyataan ini peneliti mengambil informasi dengan wawancara bersama Bapak Riza:

“Tentu, evaluasi menjadi penting karena dalam konteks keberlanjutan, kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang kita terapkan memberikan dampak yang diinginkan. Dengan mengevaluasi, kita dapat melihat apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai, dan juga mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Sejauh ini evaluasi yang kita temukan mengenai program kemarin yaa pastinya keterbatasan dana atau anggaran karena mengelola itu sangat membutuhkan dana yang lumayan besar dan juga ada beberapa proses dilapangan yang terhambat karena masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan tersebut padahal sampah yang paling banyak didapatkan ya di lingkungan masyarakat”

Mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah ini juga dijelaskan oleh ibu Sita:

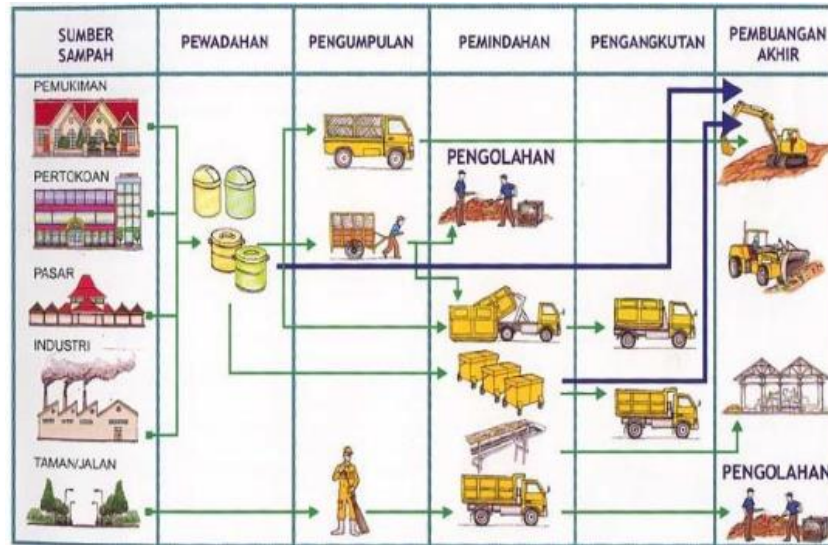
“Salah satu tantangan utama mas memastikan bahwa data yang dikumpulkan terkadang sedikit eror untuk menyamakan mencerminkan realitas lapangan. Terkadang, akses terhadap data yang akurat bisa sulit, terutama ketika melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah mengirim data tidak akurat atau ada kesalah pemahaman.

Selain itu, memahami berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan juga menjadi krusial dalam evaluasi”

Untuk evaluasi ini juga dikuatkan oleh Mas Johan sebagai tenaga kontrak dalam pengelolaan sampah :⁶⁸

“memang betul mas untuk sampah-sampah banyak berasal dari rumah tangga, terkadang kita sudah menyiapkan tempat sampah agar bisa langsung memimilah sampah yang ada contohnya ini yang basah dan ini yang kering tapi tetap meraka menjadikan satu tempat jadi kami juga malah bertamabah kerjaan jadi sedikit terlambat dan sampah juga terus berdatangan”

⁶⁸ Johan(Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023



Gambar 4.2. Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Dari jawaban wawancara dan dokumen diatas menggambarkan dengan jelas tentang pentingnya evaluasi dalam pengelolaan kebijakan daur ulang sampah. Dari partisipasi masyarakat hingga efisiensi sistem, semuanya harus diperhatikan secara serius. Meski masih ada tantangan, namun dengan komitmen dan inovasi terus-menerus, masa depan kebijakan daur ulang sampah di negara kita terkhusus di daerah Ponorogo akan menjadi lebih cerah. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan demi generasi mendatang.

C. Analisis Kebijakan Dan Pelaksanaan Program Daur Ulang Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang komprehensif guna menghadapi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Secara umum, kebijakan ini mencakup serangkaian strategi, mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, hingga kampanye edukasi tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Dinas ini aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti pemberian pelatihan pengolahan sampah organik dan inorganik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo juga

menerapkan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah yang efisien dengan melibatkan peran aktif dari warga setempat.

Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah mengintegrasikan pendekatan ramah lingkungan dengan teknologi yang ada. Mereka telah memperkenalkan metode pengelolaan sampah, seperti pihak Dinas juga telah melaksanakan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan menggalakkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Edukasi terus-menerus dilakukan kepada masyarakat mengenai manfaat dari praktik daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab guna menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi masa depan yang berkelanjutan di Ponorogo.

1. Identifikasi Masalah dalam kebijakan pengelolaan sampah

Dalam Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, terdapat beberapa masalah yang signifikan terkait kebijakan pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah yang dikategorikan sebagai limbah B3 dinas lingkungan hidup sudah berusaha menangani dalam bentuk pengelolaan agar tidak terjadi pencemaran yang merusak lingkungan yang dimana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintahan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3. lain itu dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan industri yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3, maka telah disusun beberapa peraturan teknis dalam Pengelolaan Limbah B3⁶⁹.

⁶⁹ Website direktorat jendral pengelolaan sampah, Limbah dan B3 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Penerapan kebijakan pengelolaan sampah limbah B3 di Ponorogo, atau di manapun, memiliki manfaat penting dalam menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa manfaatnya antara lain:

- a. **Perlindungan Lingkungan:** Kebijakan pengelolaan sampah limbah B3 yang efektif dapat membantu melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh zat-zat berbahaya. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat mencegah pencemaran tanah, air, dan udara.
- b. **Kesehatan Masyarakat:** Dengan mengelola limbah B3 dengan baik, risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat dikurangi. Pemaparan terhadap limbah berbahaya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti keracunan dan gangguan sistem organ. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dapat mencegah risiko-risiko tersebut.
- c. **Meningkatkan Kesadaran Lingkungan:** Implementasi kebijakan pengelolaan sampah limbah B3 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini dapat membantu membangun sikap peduli terhadap lingkungan dan mendorong praktik-praktik ramah lingkungan.
- d. **Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Sumber Daya Alam:** Pengelolaan yang efektif dapat mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam, seperti air tanah dan lahan pertanian. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
- e. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Dengan menekan risiko kesehatan dan merawat lingkungan, kebijakan pengelolaan sampah limbah B3 dapat secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan manfaat-manfaat tersebut, pemerintah setempat dan masyarakat di Ponorogo perlu bekerja sama dalam

mematuhi kebijakan pengelolaan sampah limbah B3 serta memastikan penerapannya secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai wilayah, terutama di perkotaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah juga masih rendah, sehingga program-program pengelolaan sampah yang telah ada seringkali tidak berjalan efektif. Kurang efektifnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari daur ulang dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan juga menjadi kendala dalam mengubah perilaku masyarakat. Terlebih lagi, kebijakan yang tidak tegas terkait sanksi bagi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam menyusun kebijakan yang holistik, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta guna mengatasi masalah tersebut secara komprehensif.

2. Menata formulasi kebijakan pengelolaan sampah

Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah memperlihatkan komitmen yang kuat dalam menata formulasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah Ponorogo. Melalui analisis yang cermat terhadap karakteristik lingkungan dan kebutuhan masyarakat, dinas ini telah berhasil merumuskan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan mereka tidak hanya terfokus pada pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapi juga pada edukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Dengan membangun kerjasama yang erat dengan komunitas lokal dan pihak swasta, dinas tersebut mampu menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap kebijakan yang diambil. Mereka juga terus mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam pengelolaan sampah guna mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Keberhasilan mereka dalam menata formulasi kebijakan ini

menunjukkan arah yang jelas menuju pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Adapun hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadinya kegagalan dalam menata formulasi kebijakan yaitu harus Menata formulasi kebijakan pengelolaan sampah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertama, langkah penting adalah mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan menganalisis karakteristik sampah yang dihasilkan. Selanjutnya, perlu mempertimbangkan aspek regulasi serta standar lingkungan yang berlaku guna mengembangkan kerangka hukum yang solid. Dalam menata kebijakan ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan adanya partisipasi aktif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, perlu memperhatikan aspek teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan strategi daur ulang yang efektif. Pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam formulasi kebijakan ini, untuk memastikan terciptanya perilaku yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kebijakan pengelolaan sampah dapat dirancang dengan efektif, mempromosikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.⁷⁰

3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah

Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah melakukan berbagai langkah strategis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Melalui program-program inovatif seperti pengenalan sistem daur ulang yang lebih efisien, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, serta peningkatan jumlah dan kualitas tempat pembuangan sampah, dinas ini telah berhasil mengurangi beban

⁷⁰ 12 Soekanto Soerdjono, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009,hlm. 10

sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain itu, dengan melibatkan komunitas dalam kegiatan penanaman pohon dan kampanye reboisasi, dinas ini telah berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Meskipun tantangan seperti pertumbuhan populasi yang cepat dan perkembangan industri yang pesat masih menjadi masalah, namun langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah secara komprehensif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Ponorogo merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Ponorogo telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengelola sampah secara efisien dan berkelanjutan, termasuk program pengurangan sampah, daur ulang, dan pengelolaan limbah. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengurangan sampah plastik telah menjadi fokus utama. Dengan upaya ini, Ponorogo berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sekaligus mempromosikan kesadaran lingkungan di kalangan penduduknya, serta berkontribusi pada pengurangan dampak negatif terhadap alam dan masyarakatnya.

Dan adapun faktor yang harus kita perhatikan yaitu apa kelemahan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sampah oleh dinas lingkungan hidup seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang membatasi keberhasilannya. Salah satu kelemahan yang umum terjadi adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketidaksiapan dalam mengadopsi teknologi modern dan metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga menjadi kendala yang signifikan. Terbatasnya anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang pengelolaan sampah turut menjadi hambatan serius dalam menjalankan kebijakan ini. Selain itu, rendahnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat juga memperburuk situasi tersebut. Semua kelemahan ini secara kolektif menghambat efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup, sehingga menimbulkan tantangan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai lingkungan yang bersih dan sehat.⁷¹

Gambaran umum pelaksanaan implementasi proses daur ulang sampah Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.⁷²

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah;
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir

⁷¹ Ekiv Intan Almaidah, dkk., Tinjauan Terhadap Peran Bank Sampah Asri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Puhsarang Kabupaten Kediri, Jurnal Qawanin, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 16

⁷² <https://dlh.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 10 oktober 2023

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
4. Evaluasi dalam pengelolaan Kebijakan daur ulang sampah

Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan kebijakan daur ulang sampah di wilayahnya. Evaluasi terhadap pengelolaan kebijakan daur ulang sampah ini menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan program lingkungan hidup. Secara umum, dinas ini perlu terus memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait, seperti komunitas lokal, industri, dan lembaga pendidikan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang sampah. Selain itu, penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pengelolaan sampah, seperti metode daur ulang yang inovatif dan ramah lingkungan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan efektivitas infrastruktur yang digunakan, termasuk keberlanjutan dari sistem pengumpulan dan pemilahan sampah. Dalam hal kebijakan, penting bagi dinas ini untuk mengadopsi regulasi yang mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat serta sektor bisnis dalam program daur ulang. Terakhir, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan alokasi anggaran terkait dengan kegiatan daur ulang sampah, sehingga masyarakat dapat memahami dampak positif dari program-program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dinas ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan daur ulang sampah, serta memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup di Ponorogo.

5. Faktor Yang bisa melemahkan kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, ada beberapa kelemahan yang perlu dihindari untuk memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa di antaranya:⁷³

- a. Tidak Memperhatikan Kepentingan Masyarakat: Salah satu kelemahan utama adalah tidak memasukkan pendapat dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan lingkungan tersebut. Ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, perlawanan, atau bahkan kegagalan kebijakan.
- b. Tidak Berdasarkan Data dan Bukti Ilmiah: Kebijakan lingkungan yang kuat harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Kelemahan yang umum adalah membuat kebijakan berdasarkan opini atau persepsi semata, tanpa dukungan data dan penelitian yang akurat.
- c. Tidak Terkoordinasi: Kebijakan lingkungan yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai badan pemerintah, pemangku kepentingan, dan sektor industri yang berbeda. Salah satu kelemahan adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak ini, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Tidak Melibatkan Pihak-Pihak yang Berkepentingan: Kebijakan lingkungan harus melibatkan pemangku kepentingan seperti perusahaan, LSM, dan komunitas lokal. Tidak melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan dapat mengurangi dukungan dan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut.
- e. Tidak Mengikuti Prinsip-Prinsip Keberlanjutan: Kebijakan lingkungan yang hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada lingkungan dapat menjadi kelemahan serius. Prinsip-prinsip keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan lingkungan.

⁷³ Darmanto. Implementasi Kebijakan Tata-Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang. Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 2, : 1294-1314, Juli-Desember 2012.

- f. Kurangnya Pemantauan dan Penegakan: Kebijakan yang baik harus didukung oleh sistem pemantauan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Kelemahan dalam pemantauan dan penegakan dapat menyebabkan pelanggaran yang tidak diawasi dan mengurangi efektivitas kebijakan.
- g. Kurangnya Fleksibilitas: Kebijakan lingkungan yang terlalu kaku dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi atau penemuan baru dapat menjadi kelemahan. Kebijakan perlu cukup fleksibel untuk mengatasi perubahan dalam isu-isu lingkungan.
- h. Tidak Memperhitungkan Dampak Ekonomi: Kebijakan lingkungan yang tidak memperhitungkan dampak ekonomi pada sektor-sektor tertentu atau pekerjaan dapat menghadapi resistensi dari industri atau komunitas yang terkena dampak.
- i. Tidak Mempertimbangkan Aspek Internasional: Banyak masalah lingkungan bersifat lintas batas. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kerjasama internasional atau kerja sama regional dapat menjadi kelemahan dalam mengatasi masalah ini.

Menghindari kelemahan-kelemahan ini memerlukan perencanaan yang baik, keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, penggunaan data ilmiah, serta keseimbangan antara berbagai aspek, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan dinas lingkungan hidup ponorogo memiliki program yang sangat membantu masyarakat daerah dalam penuntasan persalahan sampah yang ada di ponorogo walaupun masih adanya kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah disusun.

Dilihat dari teori dalam pelaksanaan kebijakan langkah yang di ambil oleh dinas lingkungan hidup dimulai dari Identifikasi Masalah pengelolaan sampah di daerah Ponorogo yang mencakup pertumbuhan jumlah sampah, keterbatasan infrastruktur, atau bahkan dampak lingkungan yang merugikan akibat kebijakan pengelolaan sampah yang tidak efektif. Dan adanya

identifikasi dalam menetapkan agenda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini bisa termasuk penyusunan rencana tindakan, perumusan kebijakan, dan penentuan prioritas dalam pengelolaan sampah. Untuk Perumusan Kebijakan melakukan negosiasi dan interaksi di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo akan bekerja dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat setempat, perusahaan, dan mungkin juga lembaga pemerintah lainnya untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang tepat.⁷⁴

Pelaksanaan Setelah kebijakan disetujui, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo harus melaksanakan kebijakan tersebut. Ini melibatkan penerapan rencana aksi, alokasi sumber daya, dan pembentukan struktur atau program yang diperlukan untuk mengelola sampah di wilayah tersebut. Tahap terakhir melibatkan evaluasi kinerja kebijakan yang telah diimplementasikan. Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo harus memantau efektivitas kebijakan dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dari sini, mereka dapat menentukan apakah kebijakan perlu disesuaikan atau ditingkatkan.

⁷⁴ Thomas R Dhey, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 298

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DARI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH

A. Paparan Data Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Daur Ulang Sampah

Perkembangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup ponorogo memiliki dampak yang cukup baik dikarenakan adanya kebijakan atau program pengelolaan sampah yang dimana selalu dipantau oleh dinas lingkungan hidup meskipun ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga mengakibatkan penghambatan pada proses pengelolaan tersebut.

Untuk melanjutkan penelitian ini peneliti harus melihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengelolaan sampah.

1. Faktor Pendukung

- a. Kerjasama dengan pihak swasta: Adanya kerjasama yang bagus mampu mendorong kelancaran proses pengelolaan sampah, seperti bantuan fasilitas pengolahan sampah dan tempat pembuangan yang sesuai, dapat membantu dalam pelaksanaan daur ulang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak Riza:⁷⁵

“pada umumnya mas adanya kerjasama yang baik benar-benar menjadi tulang punggung dalam upaya daur ulang yang efektif di Ponorogo. Tanpa fasilitas pengolahan sampah yang memadai, sulit mas bagi kami untuk mengelola limbah dengan benar kita juga berusaha bekerjasama dengan pihak swasta terkait pengelolaan sampah tapi sejauh ini masih dalam tahap perencanaan”

⁷⁵ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023



Gambar 5.2 Perencanaan kerjasama dengan PT Reciki dalam pengelolaan sampah⁷⁶

Beliau juga menekankan betapa pentingnya memiliki "tempat pembuangan yang sesuai" untuk mendorong masyarakat dalam membuang sampah mereka dengan cara yang ramah lingkungan.

"Kami berusaha keras untuk memberikan wadah dan area yang tepat untuk membuang sampah secara terpisah, sehingga memudahkan proses daur ulang di kemudian hari," Hal ini dijelaskan oleh ibu Sita untuk peran kerjasama dalam meminjamkan infrastruktur dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat:⁷⁷

"kami berusaha membangun fasilitas yang dapat memberikan gambaran nyata kepada masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Dengan adanya tempat sampah yang terpisah dan fasilitas pengolahan yang terbuka untuk umum, kami berharap masyarakat akan semakin teredukasi mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan"

Wawancara ini benar-benar menggaris bawahi betapa pentingnya ketersediaan infrastruktur dan kerjasama yang memadai dalam mendukung upaya daur ulang di Ponorogo. Dengan semangat dan komitmen dari tim Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan bahwa

⁷⁶ <https://ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 15 oktober 2023

⁷⁷ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

masyarakat akan semakin teredukasi dan terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan di daerah ini.

- b. Regulasi yang Mendukung: Adanya regulasi yang memfasilitasi dan mendorong praktik daur ulang sampah, seperti undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah, dapat menjadi faktor pendukung penting.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Riza:⁷⁸

“Adanya undang-undang kalau tidak salah No. 18 nanti bisa mas lihat, itu jelas dan mendukung dalam pengelolaan sampah dan bisa menjadi kunci utama untuk memastikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.”

Beliau juga menambahkan:

"Kami di Ponorogo sangat menyadari bahwa dengan adanya aturan yang mengatur dan memfasilitasi praktik daur ulang, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sebenarnya mas ini tuh bukan hanya tentang membuang sampah dengan benar, tetapi juga tentang menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan melalui praktik daur ulang yang efektif."

Hal ini juga disampaikan oleh ibu sita:⁷⁹

“Kita insyaallah selalu bertekad mas untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang sampah melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Kita yakin lah dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat “

Wawancara ini benar-benar membuka mata tentang betapa pentingnya peran regulasi dalam menggerakkan praktik daur ulang sampah. Dengan semangat yang ditanamkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, tampaknya masa depan lingkungan Ponorogo akan menjadi lebih terang dan lestari

⁷⁸ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁷⁹ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

- c. Kampanye Pendidikan: Program kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan yang efektif dapat mempercepat adopsi praktik daur ulang sampah di kalangan masyarakat. Menurut bapak Riza:⁸⁰

“Mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan bukanlah tugas yang mudah. Makanya kita melalui program kampanye pendidikan yang efektif disetiap sekolah dan banyak juga sekolah diponorogo yang mendapatkan penghargaan adiwiyata dan itu salah satu contoh dari kami berhasil membangun kesadaran yang kuat terhadap pentingnya daur ulang sampah ”

Berikut dokumentasi penyerahan kepada beberapa sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata sebagai sekolah yang mampu melakukan program pengelolaan sampah.



Gambar 5.3 Penerima penghargaan adiwiyata bersama bupati Ponorogo

Adapun nama-nama sekolah yang berpartisipasi dalam penerapan pengelolaan sampah hingga mendapatkan penghargaan adiwiyata⁸¹ adalah sebagai berikut :

⁸⁰ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁸¹ <https://dlh.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TINGKAT
1	SDN 1 Jurug	Kecamatan Sooko	SD/MI
2	SDN 1 Gelanglor	Kecamatan Sukorejo	SD/MI
3	SDN 3 Sukosari	Kecamatan Babadan	SD/MI
4	SDN 2 Jenangan	Kecamatan Jenangan	SD/MI
5	SDN 1 Somoroto	Kecamatan Kauman	SD/MI
6	SDN Sahang	Kecamatan Ngebel	SD/MI
7	SDN 2 Selur	Kecamatan Ngrayun	SD/MI
8	SDN 1 Plunturan	Kecamatan Pulung	SD/MI
9	MI Pas Baitul Qur'an Gontor	Kecamatan Mlarak	SD/MI
10	MI Terpadu Al Madinah	Kecamatan Balong	SD/MI
11	MI Darul Falah	Kecamatan Sampung	SD/MI
12	MIS Bina Putera Cendekia	Kecamatan Ponorogo	SD/MI
13	SMPN1 Mlarak	Kecamatan Mlarak	SD/MI
14	SMPN2 Sawoo	Kecamatan Sawoo	SD/MI
15	SMPN1 Pudak	Kecamatan Pudak	SMP/MTS
16	SMPN2 Slahung	Kecamatan Slahung	SMP/MTS
17	Smp Terpadu	Kecamatan Ponorogo	SMP/MTS
18	SMPN2 Satu Atap Jambon	Kecamatan Jambon	SMP/MTS
19	SMPN2 Kauman	Kecamatan Kauman	SMP/MTS
20	SMPN3 Sawoo	Kecamatan Sawoo	SMP/MTS
21	SMPN4 Sawoo	Kecamatan Sawoo	SMP/MTS
22	SMPN2 Jenangan	Kecamatan Jenangan	SMP/MTS

2. Faktor Penghambat

Dalam membahas penghambatan pasti akan kemabali lagi kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kesadaran Masyarakat

Peran Masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam melakukan Proses Daur ulang sampah Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak reza: ⁸²

“ada mas hambatan utama yang paling dibahas kayak kesadaran masyarakat. Meskipun kesadaran tentang pentingnya daur ulang semakin meningkat, mesti banyak orang yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara yang benar untuk memilah sampah dan mengapa ini penting. makanya, edukasi dan kampanye sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif dalam mendukung kebijakan ini”

Hal ini di jelaskan oleh ibu Sita:⁸³

"Salah satu hambatan utama yang kami hadapi mas, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah. Meskipun telah ada program edukasi, tetapi perubahan perilaku masyarakat tetap sulit dicapai. Kami juga kesulitan dalam mengelola dana yang memadai untuk program-program pengelolaan sampah yang efektif."

Begitupula ditambahkan oleh ibu Novita:⁸⁴

"Kesadaran masyarakat memang meningkat, tapi masih ada kendala dalam hal penerapan. Banyak warga yang terkendala dalam hal pengetahuan teknis tentang cara memilah sampah dengan benar. Kami butuh lebih banyak pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif dan juga pembantaun dari perangkat desa lainnya"

Hal ini juga ditambahkan oleh mas Johan:⁸⁵

“Saya menyadari betul akan pentingnya pengelolaan sampah, tapi kurangnya pemahaman warga mas membuat kami kesulitan untuk memilah sampah dengan benar. Sistem pengumpulan sampah yang belum teratur membuat beberapa rumah malas membuang sampah pada tempatnya."

Wawancara dengan beberapa narasumber-narasumber di atas menggambarkan kompleksitas hambatan yang dihadapi dalam

⁸² Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁸³ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

⁸⁴ Novita (Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

⁸⁵ Johan(Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

pengelolaan sampah di Ponorogo. Beberapa upaya kolaboratif dari berbagai pihak masih dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang memadai guna mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif.

b. Keterbatasan Infrastruktur

Selain itu, Infrastruktur pengelolaan sampah dan fasilitas daur ulang yang memadai tidak selalu tersedia di setiap desa jadi semua harus berpusat di pemeritahan kabupaten. Ini bisa menjadi hambatan serius dalam upaya daur ulang sampah.makanya kita perlu investasi lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pengelolaan daur ulang. Hal ini di jelaskan oleh bapak Reza :⁸⁶

"Keterbatasan terbesar kami seperti kurangnya fasilitas pemrosesan akhir yang memadai. Pada saat ini, kami hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir yang sedang mengalami kapasitas penuh. Hal ini menyulitkan pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu, kekurangan armada pengangkut sampah juga merupakan tantangan utama dalam menjaga kebersihan kota."

Sama halnya yang dijelaskan oleh ibu sita:⁸⁷

"masih belum memadai mas, pasti itu mempengaruhi keinginan masyarakat seberapa pentingnya pengelolaan sampah. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani sampah secara efektif mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat aktif. Selain itu, kurangnya fasilitas daur ulang juga membatasi kemungkinan partisipasi mereka dalam upaya pelestarian lingkungan."

Begitupula ditambahkan oleh ibu Novita:⁸⁸

"Keterbatasan infrastruktur membuat proses pengolahan sampah organik menjadi kami yang disini lebih rumit. Kekurangan fasilitas pengolahan dan pembatasan dalam memperoleh bantuan teknologi menghambat kapasitas produksi dalam mencacah memilah . Hal ini mengakibatkan sulitnya memenuhi permintaan pasar dan membatasi

⁸⁶ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁸⁷ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

⁸⁸ Novita (Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

perkembangan usaha pengolahan sampah organik secara signifikan."

Hal ini juga ditambahkan oleh mas Johan:⁸⁹

"ini pasti mengurangi kesadaran masyarakat akan urgensi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan keterbatasan akses terhadap tempat pembuangan akhir yang layak, masyarakat cenderung mengabaikan konsep daur ulang dan pembuangan yang bertanggung jawab. Mereka cenderung memilih cara yang paling mudah tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang bakar sana sini"

Wawancara dengan para narasumber ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek keterbatasan infrastruktur dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya juga faktor yang terpenting seperti keterbatasan dana atau tenaga kerja terampil.

Berkaitan dengan hambatan juga dijelaskan dan di tambahkan oleh Bapak reza: ⁹⁰

"ada juga mas peraturan dan kebijakan yang konsisten dan mudah dipahami juga penting. Terkadang, peraturan yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan daur ulang. Saya percaya kita perlu terus memperbaiki regulasi yang ada untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan ini."

Hal ini dijelaskan oleh ibu Sita:⁹¹

"keterbatasan sumber daya juga salah satu pengaruh mas Kami memiliki tenaga kontrak yang terbatas untuk mengelola sampah di seluruh wilayah. Jumlah armada pengangkut sampah juga tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh area secara efektif. Hal ini mengakibatkan

⁸⁹ Johan (Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

⁹⁰ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

⁹¹ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

penumpukan sampah di beberapa titik, terutama di daerah-daerah pinggiran yang sulit dijangkau. Kami juga kesulitan dalam menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai karena keterbatasan anggaran."

Sama halnya yang diucapkan oleh mbk Novita:⁹²

" kayaknya masih kurangnya kerjasama, soalnya kerjasama juga penting mas. soalnya Daur ulang sampah masalah yang ndk akan selesai dengan satu pihak saja. Sangat membuthkan pihak pihak lain apalagi swasta yang bergerak dalam pengelolaan sampah itu sangat membantu hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan daur ulang sampah."

Begitu pula yang dijelaskan oleh mas Johan :⁹³

"Kami sebagai tim pengelolaan sampah di PDU merasakan langsung dampak dari keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kami terlibat aktif dalam kegiatan pembersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Namun, kami juga menghadapi kendala dalam hal pengadaan alat dan dana yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan sampah."

Secara singkat dalam wawancara ini kesadaran masyarakat, infrastruktur, peraturan, dan kolaborasi adalah beberapa hambatan utama yang perlu kita atasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan daur ulang sampah. Dengan usaha bersama, saya yakin kita bisa mengatasi hambatan-hambatan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Daur Ulang Sampah

Dari penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat hal ini memberikan Dampak Dalam setiap kebijakan yang diambil dan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif,

⁹² Novita (Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

⁹³ Johan(Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. dalam analisa peneliti menjelaskan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pelaksanaan daur ulang sampah

Pengelolaan sampah merupakan isu penting di banyak kota di Indonesia, termasuk di Ponorogo. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo memiliki peran krusial dalam mengelola dan menangani isu sampah di wilayah tersebut. Salah satu faktor penting yang mendukung pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuangan sampah yang benar. Melalui kampanye pendidikan lingkungan dan sosialisasi yang intens, dinas ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Kesadaran ini kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah dan penggunaan bank sampah, yang pada gilirannya memudahkan dinas dalam proses pengelolaan sampah yang efektif.

Selain itu, investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang modern juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo. Dengan adanya dana yang dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan pusat daur ulang induk, peningkatan sistem pembuangan sampah, dan pembuatan fasilitas pengelolaan limbah, dinas ini telah mampu mengoptimalkan proses pengelolaan sampah secara efisien dan berkelanjutan. Melalui penggunaan teknologi terbaru dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo mampu mengurangi dampak negatif lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan sampah, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari pihak swasta juga menjadi faktor utama yang mendukung pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo. Dengan menjalin kerja sama strategis dengan industri-industri lokal dan swasta, dinas ini berhasil mengembangkan program-program kemitraan yang memungkinkan

pemanfaatan kembali limbah sebagai bahan baku alternatif. Selain itu, melalui kolaborasi dengan pihak swasta, dinas ini telah berhasil meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk dalam hal pengangkutan dan pembuangan sampah. Dengan demikian, kerjasama lintas sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pembuangan sampah.

Dalam Analisa ini kita dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan daur ulang sampah merupakan salah satu langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Faktor pendukung yang dapat memfasilitasi pelaksanaan daur ulang sampah mencakup beberapa elemen utama, antara lain:

a. Kerjasama dengan pihak swasta

Kerjasama dengan pihak swasta memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah tingkat daerah. Dalam konteks ini, keterlibatan sektor swasta dapat dianggap sebagai faktor pendukung yang signifikan untuk mencapai keberlanjutan dalam manajemen sampah. Pihak swasta membawa kontribusi berupa sumber daya finansial, teknologi, dan pengalaman manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah.

Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta juga membuka peluang bagi inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah. Melibatkan sektor swasta dapat mendorong pengembangan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam pengurangan sampah dan daur ulang. Selain itu, keterlibatan swasta dalam program pengelolaan sampah juga menciptakan peluang bisnis baru dan lapangan kerja di bidang ini.

Selain manfaat ekonomi, kerjasama dengan pihak swasta juga dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap inisiatif pengelolaan sampah. Melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sampah.

Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa kerjasama ini berlangsung dalam kerangka regulasi yang jelas dan berlandaskan prinsip-prinsip keberlanjutan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu ditegakkan untuk memastikan bahwa kerjasama dengan pihak swasta benar-benar memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah di tingkat daerah. Dengan demikian, melibatkan pihak swasta dapat menjadi salah satu strategi yang cerdas dan holistik untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di masyarakat.

b. Regulasi yang mendukung

Regulasi yang mendukung memainkan peran kunci dalam pengelolaan sampah tingkat daerah, memberikan landasan hukum dan pedoman yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembuangan sampah yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, pemerintah daerah dapat memberikan arah yang jelas kepada masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya dalam upaya mengelola sampah dengan efektif. Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, promosi daur ulang, dan pengurangan limbah. Selain itu, regulasi juga dapat memberikan insentif atau sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Melalui regulasi yang mendukung tidak hanya menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan sampah di tingkat daerah, tetapi juga merangsang tanggung jawab bersama

dalam menjaga lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Melalui implementasi regulasi yang efektif, pengelolaan sampah di tingkat daerah dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

c. Kampanye Pendidikan

Adanya Kampanye pendidikan memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah tingkat daerah. Melalui upaya penyuluhan dan edukasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat dan menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembuangan sampah yang benar, pengurangan limbah, dan daur ulang. Selain itu, kampanye ini juga dapat menyasar penerapan teknologi hijau dan inovasi dalam pengelolaan sampah, mengintegrasikan pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.

Dengan adanya kampanye pendidikan, masyarakat dapat belajar tentang pemilahan sampah, pengelolaan limbah organik, dan cara mendaur ulang produk. Kesadaran ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga mengurangi beban lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak terkelola dengan baik. Pendidikan juga dapat menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, seperti partisipasi dalam kegiatan pengumpulan sampah bersama atau proyek-proyek daur ulang komunitas.

Selain manfaat langsung bagi lingkungan, kampanye pendidikan tentang pengelolaan sampah juga dapat memberikan dampak ekonomi yang positif. Dengan mengajarkan konsep daur ulang dan penggunaan kembali barang, masyarakat dapat berkontribusi pada pengurangan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk produksi barang baru. Ini menciptakan peluang

untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti pembuatan produk daur ulang atau inisiatif bisnis hijau lainnya.

Secara keseluruhan, kampanye pendidikan tentang pengelolaan sampah di tingkat daerah adalah langkah yang krusial untuk menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, kita dapat mencapai tujuan pengurangan limbah global dan membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan secara ekologis dan ekonomis.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pelaksanaan daur ulang sampah dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dapat tercapai dengan lebih baik.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Daur Ulang Sampah

Analisis faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo merupakan aspek yang penting untuk dipahami guna merumuskan solusi yang efektif. Salah satu faktor utama yang dapat memperlambat pengelolaan sampah di Ponorogo adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Dengan populasi yang terus berkembang, kekurangan tempat pembuangan akhir yang memadai telah menyebabkan penumpukan sampah di berbagai wilayah, mengganggu kenyamanan masyarakat serta mengancam kelestarian lingkungan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau perencanaan yang kurang matang dalam pembangunan infrastruktur sampah.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga menjadi faktor penghambat utama. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukasi dan kampanye, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya pembuangan sampah yang tepat. Hal ini dapat terlihat dari masih maraknya kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di

tempat-tempat umum dan sungai. Kesadaran yang rendah ini dapat menjadi hambatan signifikan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, karena pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Tidak mampuan dalam menjalankan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Pelaksanaan regulasi yang lemah atau kurangnya penegakan hukum terhadap praktik pembuangan sampah ilegal dapat menyebabkan peningkatan masalah lingkungan di Ponorogo. Hal ini dapat menjadi akar dari ketidaktaatan dalam pengelolaan sampah oleh beberapa pihak, termasuk industri dan komunitas lokal. Diperlukan kerangka kerja yang kuat dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan analisis faktor penghambat Pelaksanaan daur ulang sampah yang berkemungkinan menjadi penghambat dan memperlambat proses pengelolaan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan penghambat utama dalam pengelolaan sampah. Masalah ini melibatkan minimnya pemahaman akan dampak negatif dari perilaku pengelolaan sampah yang tidak tepat. Tidak peduli terhadap pentingnya pemilahan sampah, pembuangan yang benar, dan praktik daur ulang dapat mengakibatkan penumpukan limbah yang merugikan lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran juga menciptakan tantangan dalam menerapkan kebiasaan berkelanjutan sehari-hari, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai atau pemilihan produk ramah lingkungan.

Pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak dapat dipandang sebelah mata. Tanpa kesadaran yang

memadai, upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dapat mengalami hambatan. Kurangnya kesadaran juga menciptakan risiko peningkatan polusi lingkungan, kerugian ekosistem, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perlu diperkuat melalui kampanye edukasi yang menyeluruh, pengembangan program-program sosialisasi, dan kerja sama aktif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah.

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan transformasi budaya secara lebih luas. Pendidikan yang berkelanjutan dan terus-menerus perlu ditanamkan dalam masyarakat untuk mengubah persepsi dan perilaku terkait pengelolaan sampah. Melalui peningkatan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan positif yang berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan

b. Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat yang signifikan dalam upaya pengelolaan sampah. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menciptakan tantangan dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah secara efisien. Salah satu aspek kritis adalah sistem pengangkutan sampah yang terkendala oleh jalan yang rusak atau tidak memadai, menyebabkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari sumbernya ke tempat pemrosesan.

Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir dan pabrik daur ulang juga dapat terpengaruh oleh keterbatasan infrastruktur. Kurangnya fasilitas pemrosesan yang modern dan ramah lingkungan dapat mengarah pada praktik pembuangan sampah terbuka yang tidak berkelanjutan,

meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Dalam situasi ini, masyarakat sering kali terpaksa menghadapi dampak negatif terkait kesehatan akibat limbah yang tidak tertangani dengan baik.

Pentingnya infrastruktur yang memadai juga muncul dalam konteks teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Sistem yang terkendala oleh keterbatasan teknologi mungkin tidak dapat menerapkan inovasi seperti sensor pintar untuk pemantauan limbah atau sistem informasi yang terintegrasi untuk melacak alur sampah dari sumbernya hingga pemrosesan akhir. Ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi terkini dapat menghambat progres menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur bukan hanya menjadi hambatan fisik, tetapi juga menyangkut aspek teknologi dan manajemen. Mengatasi keterbatasan ini memerlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh dan dapat menangani volume sampah yang semakin meningkat. Peningkatan infrastruktur, baik dari segi transportasi maupun fasilitas pengolahan, adalah langkah krusial untuk mencapai pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan.

c. Kurangnya Sumber Daya

Kurangnya sumber daya merupakan hambatan utama dalam pengelolaan sampah yang efektif. Dalam banyak kasus, negara-negara atau daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya finansial, teknis, dan manusia sering kesulitan mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Aspek finansial menjadi kendala serius karena pengelolaan sampah yang efektif memerlukan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan pelatihan tenaga kerja. Banyak pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran cenderung kurang mampu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan memenuhi standar lingkungan.

Selain itu, aspek teknis juga menjadi kendala serius. Implementasi sistem daur ulang, pemilahan sampah, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Banyak daerah yang tidak memiliki akses terhadap teknologi canggih atau ahli yang mampu mengelola dan memperbarui sistem pengelolaan sampah mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan metode tradisional yang kurang efisien dan dapat merugikan lingkungan.

Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Tenaga kerja yang terbatas dalam jumlah dan pengetahuan tentang praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menggalakkan partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Kondisi ini sering kali menyebabkan beban kerja yang berlebihan pada petugas pengelolaan sampah, yang pada gilirannya dapat menghambat kinerja operasional mereka.

Dalam mengatasi kurangnya sumber daya sebagai hambatan dalam pengelolaan sampah, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur, penelitian, dan pelatihan tenaga kerja dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini. Selain itu, pengembangan model pengelolaan sampah yang sederhana, terjangkau, dan dapat diadopsi secara luas dapat menjadi solusi untuk daerah-daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada, diperlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan sikap masyarakat terkait lingkungan, peningkatan investasi pada infrastruktur daur ulang, implementasi kebijakan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, hingga penyediaan pendidikan yang tepat guna. Selain itu, peningkatan

kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi bagian krusial dalam proses ini. Dengan adanya integrasi komprehensif antara semua faktor ini, diharapkan dapat tercipta langkah-langkah yang efektif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan serta mewujudkan perubahan positif bagi ekosistem..



BAB VI

DAMPAK KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT

A. Paparan Data tentang Dampak Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Daur Ulang Sampah terhadap Ekonomi Masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo kemungkinan besar telah mengadopsi program pengelolaan daur ulang sampah yang efektif di wilayah Ponorogo. Dengan kebijakan ini, mereka mungkin telah berhasil mengurangi jumlah limbah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya praktik ramah lingkungan di antara masyarakat. Selain itu, hasil dari program ini mungkin juga meliputi peningkatan kualitas udara dan peningkatan kebersihan lingkungan, menyediakan peluang ekonomi baru melalui industri daur ulang, serta membuka jalan bagi inovasi dan teknologi baru dalam upaya mengatasi masalah lingkungan di Ponorogo. Dengan demikian, langkah-langkah progresif ini mungkin telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat, menciptakan landasan yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang di kota tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan

Melalui program daur ulang, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Hal ini dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, misalnya melalui industri kreatif daur ulang atau pengelolaan limbah. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak reza:⁹⁴

“Nah, kebijakan pengelolaan daur ulang sampah sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar pada ekonomi masyarakat. Pertama-tama, ini menciptakan lapangan kerja. Misalnya, di sini kami memiliki program

⁹⁴ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

pembentukan unit bank sampah untuk daur ulang ditingkat pedesaan dan ada juga pengelolaan sampah di dekat tps mrican dalam pembuatan briket di mana orang dapat bekerja dan ada juga mengumpulkan dan mengelola sampah daur ulang di bank sampah induk yang berada di purbosuman. Ini memberikan pekerjaan baru dan berkontribusi pada penghasilan mereka hasilnya kami kirimkan ke daerah sidoarjo.”



Gambar 6.1. Proses Pengelolaan sampah di TPA Mrican

Adanya program bank sampah yang bisa memberikan dampak yang baik dalam meraup hasil dari pengelolaan sampah ditingkat desa seperti pembangunan bank sampah :

No.	Nama Bank Sampah	Kategori	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Bank Sampah Unit Bank Sampah Sri Tanjung	Unit	Tanjungsari	Kab. Ponorogo
2	Bank Sampah Induk Purbosuman Ponorogo	Induk	Jl. Doplang	Kab. Ponorogo
3	Bank Sampah Pilang Suko Ii	Unit	Pilang Suko	Kab. Ponorogo
4	Bank Sampah Manunggal Karso	Unit	Paju	Kab. Ponorogo

5	Bank Sampah Sri Mukti	Unit	Mt. Haryono	Kab. Ponorogo
6	Bank Sampah Melati	Unit	Purwosari	Kab. Ponorogo
7	Bank Sampah Melati	Unit	Purwosari	Kab. Ponorogo
8	Bank Sampah Ngudi Asri	Unit	Desa Campursari	Kab. Ponorogo
9	Bank Sampah Lampah Berkat	Unit	Jalan Kamajaya	Kab. Ponorogo
10	Bank Sampah Sumber Rejeki	Unit	Desa Tulung	Kab. Ponorogo
11	Bank Sampah Krajan Berseri	Unit	Patihan Wetan	Kab. Ponorogo
12	Bank Sampah Bumi Lestari	Unit	Desa Crabak	Kab. Ponorogo
13	Bank Sampah Sortasi Cendrawasih	Unit	Jalan Merak, RT/RW 002/001	Kab. Ponorogo
14	Bank Sampah Sortasi Mawar	Unit	Dukuh Krajan, Rt/Rw 003/002	Kab. Ponorogo
15	Bank Sampah Sortasi Dahlia	Unit	Dkh. Besaran, RT/RW 002/002	Kab. Ponorogo
16	Bank Sampah Sortasi Teratai	Unit	Dkh. Prambon, RT/RW 001/001	Kab. Ponorogo
17	Bank Sampah Sortasi Melati	Unit	Ronosentanan	Kab. Ponorogo
18	Bank Sampah Mulya Lestari	Unit	Sampung	Kab. Ponorogo
19	Bank Sampah Sumber Rejeki	Unit	Sampung	Kab. Ponorogo
20	Bank Sampah Putri Songgolangit	Unit	Paju	Kab. Ponorogo
21	Bank Sampah Mari Peduli	Unit	Nongkodono	Kab. Ponorogo

Tabel 6.2 Data Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo

Sama halnya disampaikan oleh ibu sita terkait:⁹⁵

“Ya, tentu! Selain lapangan kerja, kebijakan daur ulang dapat lumayan mengurangi biaya sampah yang harus dikeluarkan oleh daerah. Ketika lebih banyak sampah didaur ulang, kurang sampah yang harus dibuang di tempat pembuangan akhir, yang bisa menghemat uang. Selain itu, daur ulang juga dapat menciptakan peluang bisnis baru. Banyak orang mulai memulai usaha daur ulang sendiri, seperti mendaur ulang kertas, plastik, atau logam, dan ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan tapi memang diponorogo belum terlalu maksimal”

Hal ini dijelaskan juga oleh mas johan:⁹⁶

“kita melakukan daur ulang sampah lumayan mengurangi pemakaian anggaran mas, jadi dinas tidak selalu memasukkan anggran ke kita kecuali kalau urgent seperti mesin pemilah rusak maka harus pakai biaya yang besar juga ”

Mengenai daur ulang sampah juga dirasakan oleh masyarakat yang berada dikawasan bank sampah induk yang ada di purbosuman untuk hal ini dijelaskan oleh Ibu Retno Nasabah Bank Sampah Induk:⁹⁷

“Saya rasa mas bank sampah induk lumayan membawa perubahan positif untuk menampung sampah di wilayah ini. Tidak hanya membantu mengurangi sampah yang berserakan, tetapi juga mendorong kesadaran pentingnya daur ulang. Anak-anak sekarang juga belajar untuk memilah sampah, ini memberi dampak besar bagi lingkungan kita”

Sama halnya ada respon yang didapatkan oleh Pak Joko salah satu Nasabah Bank sampah induk purbosuman:⁹⁸

“lumayan membantu mas bank sampah induk ini apalagikan saya dagang. Sampah yang biasanya berserakan di sekitar toko saya sekerang sudah bisa didaur ulang atau dijual ke bank sampah induk. inikan membuat lingkungan

⁹⁵ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

⁹⁶ Johan(Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

⁹⁷ Retno (Nasabah Bank Sampah Induk Purbosuman) wawancara , Ponorogo, 2 Oktober 2023

⁹⁸ Joko (Nasabah Bank Samapah Induk) Wawancara wawancara , Ponorogo, 9 Oktober 2023

toko saya bersih tetapi juga memberikan tambahan sedikit
 lah dari penjualan sampah yang tadinya hanya menjadi
 berserakan”

Dan dampak bank sampah juga dirasakan oleh ibu Siti salah satu
 Nasabah Bank sampah induk Purbosuman:⁹⁹

“bank sampah induk ini sedikit memberi inspirasi
 masyarakat di sekitar saya untuk lebih peduli terhadap
 kebersihan lingkungan. Saya melihat semakin warga yang
 ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah, baik secara
 sukarela maupun sebagai bagian dari program sosial. Ini
 telah menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat antar warga
 di sekitar”

Lain halnya penjelasan dampak bank sampah induk oleh bapak
 Supardi Nasabah bank sampah induk Purbosuman:¹⁰⁰

“Dari perspektif saya, bank sampah induk membuka
 peluang usaha baru untuk masyarakat. Saya melihat banyak
 orang yang mulai memanfaatkan sampah sebagai bahan baku
 untuk kerajinan atau produk kreatif lainnya. Hal ini tidak
 hanya mengurangi sampah yang terbuang tetapi juga
 menciptakan peluang ekonomi.”



Gambar 6.2. Lokasi Bank Sampah Induk Ponorogo

⁹⁹ Siti (Nasabah Bank Sampah Induk Purbosuman) wawancara , Ponorogo, 9 Oktober 2023

¹⁰⁰ Supardi (Nasabah Bank Sampah Induk Purbosuman) wawancara , Ponorogo, 2 Oktober 2023

Dari hasil wawancara ini sudah menjelaskan adanya harapan bahwa dengan dorongan yang tepat, kebijakan pengelolaan daur ulang bisa menjadi pilar penting dalam ekonomi masyarakat di masa depan. Ini dapat menciptakan komunitas yang lebih berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Namun, kita juga harus terus mengedukasi orang tentang pentingnya daur ulang dan bagaimana melakukannya dengan benar.

2. **Penigkatan pendapatan dan pengurangan Biaya Produksi**

Perusahaan atau industri yang menerapkan praktik daur ulang dalam rantai produksi mereka dapat mengurangi biaya produksi dengan menggunakan bahan baku daur ulang. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak riza dalam wawancara :¹⁰¹

“Ya, kami telah aktif mempromosikan praktik daur ulang di Ponorogo melalui media dinas lingkungan hidup ponorogo. Selain memberikan pemahaman tentang manfaat lingkungan, kami juga menekankan manfaat ekonomi yang signifikan. Banyak industri yang sudah mengadopsi praktik daur ulang sebagai cara untuk mengurangi biaya produksi mereka seperti kurban kemarin kami menyampaikan menggunakan bahan yang bisa terurai kayak daun jati, rajutan rajutan bambu dll.”

Hal ini juga dijelaskan oleh mas Johan :¹⁰²

“Jadi, menurutku kebijakan ini cukup bagus mas. Mereka menggalakkan pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti pemilahan sampah organik dan non-organik, serta daur ulang kertas, plastik, dan logam. Itu seharusnya membantu kami di bank sampah induk ini dan mengurangi sampah yang akhirnya masuk ke tempat pembuangan sampah.”

Mengenai ini juga di jelaskan oleh ibu sita:¹⁰³

“Peran konsultan lingkungan sangat penting dalam mendorong industri untuk menerapkan praktik daur ulang.

¹⁰¹ Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

¹⁰² Johan(Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

¹⁰³ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

Kami membantu mereka memahami manfaat ekonomi jangka panjang dari praktik ini, terutama dalam pengurangan biaya produksi. Kami juga membantu mereka dalam perencanaan infrastruktur dan proses yang efisien untuk mendaur ulang bahan baku.”

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Ponorogo memiliki 23 Bank Sampah yang terdiri dari 7 Bank Sampah yang berstatus aktif dan 14 lainnya tidak aktif dan datanya sebagai berikut:

No	Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	BS. Manunggal Karsa	200	Aktif	20	14	Rp200,000.00
2	BS. Melati	520	Aktif	20	19	Rp520,000.00
3	BS. Pilang Suko II	110	Aktif	20	5	Rp110,000.00
4	BS. Nusantara	300	Aktif	40	4	Rp300,000.00
5	BS. Sri Tanjung	175	Aktif	45	3	Rp175,000.00
6	BS. Sri Mukti	110	Aktif	40	5	Rp110,000.00
7	BS. Hijau Berseri		Aktif			
8	BS. Bumi Lestari		T. Aktif			
9	BS. Kartika Jaya		T. Aktif			
10	BS. Krajan Berseri		T. Aktif			
11	BS. Lampah Berkat		T. Aktif			
12	BS. Mari Peduli		T. Aktif			
13	BS. Mulya Lestari		T. Aktif			
14	BS. Ngudi Asri		T. Aktif			
15	BS. Putri Songgolangit		T. Aktif			
16	BS. Sortasi Dahlia		T. Aktif			
17	BS. Sortasi Melati		T. Aktif			

18	BS. Sumber Rejeki		T. Aktif			
19	BS. Kartika Brojo Negaran		T. Aktif			
20	BS. Sortir Mawar		T. Aktif			
21	BS. Sortir Cendrawasih		T. Aktif			

Tabel 6.3 Status dan Pendapatan Bank sampah kabupaten Ponorogo

Dari tabel diatas menjelaskan adanya dampak berupa pemasukkan kepada masyarakat yang aktif dan terlibat dalam program bank sampah disetiap desa dan berikut juga menjelaskan persentase dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di setiap proses pengelolaan sampah :

No.	Tempat	Nama	Rata-rata pendapatan per-bulan	Pendapatan hasil pengelolaan sampah perbulan	Persentase kenaikan pendapatan
1	Bank sampah Purbosuman	Mbak.Novita	± Rp. 1.500.000	± Rp.100.000	6.67%
2		Pak.Agus	± Rp. 1000.000	± Rp.150.000	15.00%
3		Mas. Johan	± Rp. 1.600.000	± Rp.90.000	5.63%
4		Ibu.Siti	± Rp. 1.200.000	± Rp.50.000	4.17%
5		Pak.Supardi	± Rp. 1.600.000	± Rp.100.000	6.25%
6	TPA Mrican	Pak. Rahmat	± Rp. 1000.000	± Rp.100.000	10.00%
7		Pak. Rasid	± Rp. 1.200.000	± Rp.90.000	7.50%
8		Pak.Badrul	± Rp. 900.000	± Rp.150.000	16.67%

Tabel 6.4 Peningkatan pendapatan pengelolaan sampah

Hasil wawancara dan dokumen data berikut menunjukkan bahwa praktik daur ulang memiliki potensi besar untuk mengurangi biaya produksi perusahaan dan industri, dengan dukungan yang tepat dari pemerintah setempat dan kesadaran kolektif dari para pemangku kepentingan terkait.

3. Pengurangan Dampak Lingkungan

Dengan mengelola sampah secara efisien, kebijakan daur ulang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan dampak negatifnya. Dengan demikian, masyarakat akan mengalami peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Mengenai hal ini juga di sampaikan oleh pak riza dalam sesi wawancara:¹⁰⁴

“Jadi, menurut saya kebijakan ini cukup bagus, pasti hal ini juga berkaitan dengan ekonomi. Mereka menggalakkan pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti pemilahan sampah organik dan non-organik, serta daur ulang kertas, plastik, dan logam itu saja sudah menghasilkan bagi bank sampah yang ada di ponorogo termasuk bank sampah induk yang ada di purbasuman. Itu juga seharusnya membantu lingkungan kita dan mengurangi sampah yang akhirnya masuk ke tempat pembuangan sampah.”

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Johan:¹⁰⁵

“sebenarnya sama mas kayak pekerjaan pada umumnya, pasti menghasilkan uang tergantung kita saja mau apa ndk berbuat, bank sampah ini saja lumayan ada hasil untuk menutupi operasionalnya kita sama ada tambahan pegangan lah kalau ada apa2”

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak rahmat:¹⁰⁶

"Ya, memang, Mas. Kalau sampahnya gak dikelola dengan baik, lingkungan kita bisa jadi kayak tempat pembuangan sampah, bukan tempat tinggal. Ini kan gak sehat buat kita semua, kalau menghasilkan pasti menghasilkan lah"

Penelitian ini juga diperkuat oleh Ibu sita:¹⁰⁷

"Banyak, Mas. Kita kan gak bisa seenaknya buang sampah sembarangan. Kebiasaan kayak gitu bikin udara jadi kotor, air jadi tercemar, akhirnya kesehatan masyarakat juga jadi terganggu, Daur ulang itu solusi cerdas, Mas. Kita jadi

¹⁰⁴Riza (Koordinator koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan) wawancara, Ponorogo, 18 September 2023

¹⁰⁵ Johan (Tenaga Kontrak koordinator persampahan dan sarana prasarana pengelolaan sampah domestik), wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023

¹⁰⁶ Rahmat (Aktivis pengelolaan sampah TPA Mrican) wawancara, Ponorogo, 5 Oktober 2023

¹⁰⁷ Sita (koordinator di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.), wawancara, Ponorogo, 25 September 2023

bisa memanfaatkan sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang jadi barang berguna. Lebih hemat juga buat lingkungan, kan. Jadi, sekalian kita jaga bumi biar tetep hijau”

No.	KETERANGAN	Nilai (Ton/Tahun)
I	Jumlah timbulan sampah	139,552.49
II	Jumlah pengurangan sampah	29,321.69
	Persentase pengurangan sampah	21:01
	Jumlah pembatasan timbulan sampah	2,842.25
	Jumlah pemanfaatan kembali sampah	36.71
	Jumlah pendauran ulang sampah	26,442.73
III	Jumlah penanganan sampah	85,012.15
	Persentase penanganan sampah	60.92
	Pengolahan	1,062.15
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	1,062.15
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
	Pemrosesan akhir	83,950.00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	83,950.00
IV	Sampah yang dikelola (ii + iii)	114,333.84
	Persentase sampah terkelola	81.93
V	Sampah tidak dikelola (i - iv)	25,218.65
	Persentase sampah tidak terkelola	18:07

Tabel 6.1. Data pengelolaan Sampah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Dari hasil wawancara dan observasi, kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menunjukkan

komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan lingkungan di wilayah tersebut. Para pejabat di dinas tersebut secara berusaha konsisten menekankan pentingnya pendekatan dalam menangani masalah sampah, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat, implementasi program daur ulang yang efektif, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga menyoroti betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini. Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa upaya mereka telah membuahkan hasil positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung program-program daur ulang. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, yang berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Daur Ulang Sampah terhadap Ekonomi Masyarakat

Analisis dampak kebijakan pengelolaan daur ulang sampah terhadap ekonomi masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menandai langkah penting menuju kesadaran lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap sektor ekonomi lokal. Dengan menggalakkan praktik daur ulang, masyarakat lokal diberdayakan untuk terlibat dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penjualan sampah berikut penjelasannya:

1. Penciptaan Lapangan Kerja

Industri daur ulang dapat menciptakan peluang kerja baru dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu komunitas hal ini juga menciptakan peluang kerja baru dan mendorong lahirnya bisnis skala kecil yang berkaitan dengan daur ulang, seperti industri pengolahan

limbah, yang pada gilirannya memperkuat perekonomian lokal dengan cara membangun bank sampah di setiap desa untuk mempermudah proses daur ulang sampah berikut data jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Ponorogo .

Bank sampah merupakan inisiatif penting yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Ponorogo. Pertama, bank sampah mampu menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui mekanisme pengumpulan dan penjualan sampah. Dengan adanya bank sampah, masyarakat dapat mengubah sampah menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif terhadap ekonomi rumah tangga. Selain itu, bank sampah juga mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meminimalkan biaya pengelolaan sampah bagi pemerintah setempat.¹⁰⁸ Dengan demikian, bank sampah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesadaran lingkungan di Ponorogo.

2. Peningkatan Pendapatan

Aktivitas daur ulang dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, baik melalui penjualan barang daur ulang maupun melalui pekerjaan terkait daur ulang. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya daur ulang, masyarakat lokal dapat memanfaatkan peluang ekonomi baru dengan menjual sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Hal ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan daya beli di wilayah tersebut. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan daur ulang sampah secara tidak langsung turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Ponorogo.

Namun, analisis juga menggaris bawahi beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Salah

¹⁰⁸ Ahmad Thoriq Alfarisyi, Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya), Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm.545

satunya adalah kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai. Meskipun kebijakan telah diterapkan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dapat menghambat upaya pengelolaan daur ulang sampah yang efektif. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu memastikan adanya investasi yang memadai untuk membangun infrastruktur yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara efektif. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek edukasi dalam kebijakan ini. Edukasi yang memadai akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dari praktik daur ulang sampah. Dengan memahami kontribusi positifnya terhadap ekonomi dan lingkungan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan daur ulang. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi yang efektif dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebijakan ini.

Dalam analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dapat menjadi sumber potensial pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- a. Daur Ulang dan Pengolahan: Mendorong proses daur ulang dan pengolahan sampah yang lebih efisien dan inovatif dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pendapatan dapat diperoleh dari penjualan produk daur ulang, seperti kertas, logam, atau plastik.
- b. Program Penukaran Sampah: Menerapkan program penukaran sampah dengan imbalan uang atau barang dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang mengumpulkan sampah, yang kemudian dapat dijual atau didaur ulang.

- c. Pengelolaan Sampah Organik: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah organik, seperti dengan membuat kompos dari limbah organik, dapat menghasilkan pupuk alami yang bisa dijual. Hal ini juga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan mengurangi beban lingkungan.
- d. Pembuatan Produk Kreatif dari Sampah: Menginspirasi masyarakat untuk menggunakan kreativitas mereka dalam mendaur ulang sampah menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual dapat menjadi sumber pendapatan alternatif. Contohnya, barang-barang kerajinan tangan dari barang bekas dapat dijual di pasar lokal atau secara online.
- e. Penyediaan Layanan Pengelolaan Sampah: Membuka bisnis yang menyediakan layanan pengelolaan sampah, seperti layanan pengangkutan sampah, pengolahan limbah, atau daur ulang, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat sekitar dalam hal pengelolaan sampah juga dapat membuka peluang kerja baru.
- f. Pemberian Subsidi dan Insentif: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada perusahaan atau usaha kecil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, baik dalam bentuk pembebasan pajak, bantuan modal, atau fasilitas lainnya untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.
- g. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Melalui program edukasi dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat diajak untuk secara aktif terlibat dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat akan teredukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan cara-cara untuk menghasilkan pendapatan dari praktik tersebut.

Melalui implementasi strategi-strategi ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pengurangan Biaya Produksi

Dengan menggunakan bahan baku daur ulang, beberapa industri dapat mengurangi biaya produksi mereka, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha

- a. Penggunaan Kembali dan Daur Ulang Bahan Baku: Jika Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dapat mengelola sampah dengan efektif, ini bisa membuka peluang untuk penggunaan kembali dan daur ulang bahan baku yang sebelumnya dianggap sebagai sampah. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi yang sebelumnya dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku baru.
- b. Pengurangan Biaya Pembersihan dan Pemrosesan Sampah: Dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang efisien, biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembersihan dan pemrosesan sampah dapat berkurang. Ini termasuk biaya pengangkutan, pemilahan, dan pengelolaan sampah secara keseluruhan.
- c. Pengurangan Biaya Pemrosesan Limbah: Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, biaya pemrosesan limbah juga akan menurun. Proses pengelolaan limbah yang efisien akan membantu mengurangi biaya yang terkait dengan pemrosesan limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
- d. Mengurangi Biaya Pemulihan Lingkungan: Pengelolaan sampah yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran tanah dan air. Dengan demikian, biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan akibat dampak sampah dapat berkurang secara signifikan.
- e. Peningkatan Citra dan Reputasi Perusahaan: Dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, citra perusahaan akan meningkat. Hal ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan daya tarik perusahaan di mata konsumen dan investor potensial, yang pada gilirannya dapat membuka peluang investasi baru dan kemitraan yang menguntungkan.

Dengan menerapkan pengelolaan sampah yang efektif, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo berhasil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan biaya produksi serta peningkatan keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Melalui upaya ini, mereka berhasil memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh sampah, mereka turut berperan dalam mendukung kelestarian ekosistem dan mengurangi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas manusia. Dengan adanya pengelolaan sampah yang efektif, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah menetapkan standar baru dalam upaya perlindungan lingkungan, yang diharapkan dapat diadopsi oleh wilayah-wilayah lain sebagai model yang berhasil dan berkelanjutan..

4. Pengurangan Dampak Lingkungan

Dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang, kebijakan pengelolaan daur ulang dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak lingkungan negatif. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak positif yang mungkin terjadi:

- a. Pengurangan Pencemaran Tanah dan Air: Dengan pengelolaan yang baik, pembuangan sampah yang tidak terkendali dan tidak tepat dapat dicegah. Hal ini akan mengurangi risiko pencemaran tanah dan air oleh bahan-bahan kimia berbahaya dari sampah.
- b. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Melalui praktik daur ulang, kompos, dan pengelolaan limbah organik, emisi gas rumah kaca dari pembusukan sampah di tempat pembuangan akhir dapat dikurangi. Langkah ini dapat membantu dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

- c. Peningkatan Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat: Pengelolaan sampah yang baik akan mengurangi risiko penyebaran penyakit melalui vektor seperti serangga dan tikus. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Konservasi Sumber Daya Alam: Praktik daur ulang dan pengelolaan sampah yang efektif akan mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru, yang pada gilirannya akan membantu dalam pelestarian sumber daya alam.
- e. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Dengan adanya pengelolaan yang transparan dan efektif, masyarakat akan menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan.

Untuk mencapai dampak yang signifikan, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo perlu memperhatikan implementasi kebijakan yang konsisten, kampanye kesadaran masyarakat yang efektif, serta penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah. Dalam jangka panjang, upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Ponorogo.

Secara keseluruhan, Menurut Edi Soeharto adanya keberdayaan masyarakat bisa dilihat dari sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Dalam analisis dampak kebijakan pengelolaan daur ulang sampah terhadap ekonomi masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini,

¹⁰⁹ Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat", (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 57

perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi kendala infrastruktur dan meningkatkan program edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan daur ulang sampah dapat terus memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di Ponorogo.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian terkait Pelaksanaan Program Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Untuk Keberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan program daur ulang sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo telah membawa dampak positif yang terhadap efisiensi pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan. Melalui kegiatan daur ulang ini, penanganan sampah di Ponorogo telah menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, program ini secara aktif membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air serta penurunan kualitas udara. Penerapan program daur ulang juga telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui kampanye dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat semakin memahami manfaat dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta dampak positifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan demikian, adopsi perilaku ramah lingkungan seperti pemilahan dan daur ulang sampah semakin menjadi kebiasaan yang diterapkan secara luas di kalangan masyarakat Ponorogo. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
2. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan, timbulnya dukungan apabila ada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan program daur ulang sampah. Keterlibatan

aktif dari masyarakat, pendekatan partisipatif, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara bijaksana dan itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini dan adapun faktor penghambat dalam proses daur ulang sampah yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung dalam proses pengelolaan sampah dan itu menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintahan daerah dan beberapa peran masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan ini.

3. Program daur ulang sampah telah membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat, dengan membuka peluang baru yang meliputi dua aspek utama. Pertama, program ini telah mendorong lahirnya industri produk daur ulang yang tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Kedua, melalui pelatihan keterampilan dalam pengelolaan sampah, masyarakat setempat telah memperoleh pengetahuan dan keahlian baru yang memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam proses daur ulang, pengelolaan, dan pengolahan sampah secara efisien. Dengan demikian, pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan dan kemandirian ekonomi mereka pun terdongkrak. Ini juga menciptakan dampak positif jangka panjang, dengan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk lingkungan sekitar mereka..

B. Saran

1. Pengembangan Infrastruktur: Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur yang mendukung, seperti penyediaan tempat pembuangan sampah terpisah, stasiun pengumpulan sampah, dan fasilitas pengolahan sampah, untuk memperkuat dan memperluas cakupan program daur ulang sampah.
2. Penggalangan Dana dan Kerjasama: Diperlukan upaya untuk menggalang dana lebih lanjut baik dari pemerintah, sektor swasta, atau

sumber dana lainnya guna mendukung perluasan dan keberlanjutan program ini. Selain itu, penting untuk menjalin kerjasama yang kuat dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memperkuat dampak program.

3. Pengembangan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan program pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pendidikan dan sosialisasi akan membantu memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam program daur ulang sampah.
4. Pengembangan Riset dan Inovasi: Diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengembangan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Ini dapat membantu dalam memperbaiki proses daur ulang yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih luas.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan program daur ulang sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar baik bagi lingkungan maupun keberdayaan ekonomi masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang

Salinan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 22 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah

Salinan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016

Buku

Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Afabeta, 2008), Hlm, 7

Tanzeh Ahmad dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian. (Surabaya: eLKAF) hal 332

Wintoko Bambang, Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan
Ganda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial, Cet. I,
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm, 65

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Ponorogo 2022, hlm, 95

Suharto Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT
Revika Aditama, Cet ke-1, 2005), h. 57

Suratno Gunawan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2004), hal 24.

Nugroho Rian, Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan
Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm, 190-191.

Mikel Humber & Miles M.B, Qualitative Data Analisis, (Beverly Hills: SAGE
Publication, Inc, 1992), hlm 16

Irwan Ahmad, Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal,
(Yogyakarta; Deepublish, 2018), hal 27.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm. 135

Islamy Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), Hlm. 17

Marzuki Malik, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), hlm. 55

Sudjana Ibrahim Nana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar
Baru, 1984), hlm. 4

- Hadari Nawawi , Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm 1
- Muhadjir Noeng , Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104
- Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009), h. 120
- Sudarwan Danim, Transformasi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,Cet. Ke-1, April 1995), h. 56
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 127
- Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widjaya Karya, hlm. 234
- Arikunto Suharsimi , Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),hal 102.
- R Dhey Thomas , Understanding Public Policy (New Jersey: Prentice Hall, 1995) Hlm.298
- Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebiato “Pemberdayaan Masyarakat dalam prespektif kebijakan Publik”, (Bandung:Alfabet),hlm 39
- Abdurrahmat Fathoni, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.10
- Indah Gumuk , Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta, Magister Ilmu Sains, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 10
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan,(Jakarta :Walhi, 2003), hlm 67
- Nurhasna, Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare, Parepare: STAIN Parepare,2017
- Soerdjono Soekanto , Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009,hlm. 10

Anwar Mufid Sofyan , Ekologi Manusia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 70

Jurnal

Agung, Winarno , Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Organik Di Desa Krejen Probolinggo, Vol 1, No 1 (2019)

Alfarisyi, Ahmad Thoriq, Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya), Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm. 541-554

Darmanto. Implementasi Kebijakan Tata-Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang. Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 2, : 1294-1314, Juli-Desember 2012.

Ekiv Intan Almaidah, dkk., Tinjauan Terhadap Peran Bank Sampah Asri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Puhsarang Kabupaten Kediri, Jurnal Qawanin, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 16

Ajarcd, Empowerment and the Dissemination of Information," Journal of Community Development, vol. 15, no. 2 (2018): 45-52.

Firmansyah Hairi (Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin) Volume 02 Nomor 02 Juni 2012

Anih Sri Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah, Jurnal Penelitian, Vol. 5, No. 10, 2014

Wahyuning Widiarti Ika ,Pengelolaan Sampah Berbasis "Zero Waste" Skala Rumah Tangga Secara Mandiri dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 4 No. 2 Juni 2012, hlm. 101

Muzdalifah Isrotul , Pengelolaan Bank Smapah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara), Semarang: UIN Walisongo,2019

Krejengan Probolinggo, Jurnal Graha Pengabdian (E- ISSN: 2715-5714) Vol. 1, Malang: UIN Malang,2019, hlm.63-70

Makmur Selomo, Agus Bintara Birawida, Anwar Mallongi, Muammar, Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah dalam Jurnal MKMI, Vol. 12 No. 4, Desember 2016

Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi, Academics in Action Journal Volume, Number 1,27-37,2018

Purwanto, Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Ragil Gunawan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sampah Rumah Tangga Melalui Kelompok Sadar Sampah “Sri Kandi” Di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vo. 10 No.3 2017

Roza Linda, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai), Jurnal Al-Istiqna, Edisi 12 Volume I, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

Sari, Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Vol.5 No.22, 2016, hal.573–579

Skripsi/Tesis

Azelia Deskasari, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019

Mohammad Abdul Aziz, “Modal Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi: IAIN Jember, 2018).

Nurhasna, Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare, Parepare: STAIN Parepare, 2017

Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara), Semarang: UIN Walisongo, 2019

Website

<https://:Wikipedia bahasa indonesia,esklopedia bebas-daur-ulang.htm//> diakses tanggal 1 September 2022

Website direktorat jendral pengelolaan sampah, Limbah dan B3 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Citizen Awareness of Sorting Waste Is Still Low - National Katadata.co.id diakses pada 30/8/2022 pukul 18.50

[http://www.merdeka.com/Mengenal Jenis Sampah Beserta Cara Mengelolanya, Bantu Atasi Pencemaran Lingkungan | merdeka.com](http://www.merdeka.com/Mengenal_Jenis_Sampah_Beserta_Cara_Mengelolanya,_Bantu_Atasi_Pencemaran_Lingkungan_|_merdeka.com) diakses 30/8/2022 pukul 19.00

<https://dlh.ponorogo.go.id/kinerja/dikplhd/> diakses pada tanggal 30/8/2022 pukul 19.20

<https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.pdf> diakses tanggal 1 September 2022

[https:// Ponorogo.go.id/from traces to money/](https://Ponorogo.go.id/from_traces_to_money/) Diakses 30/8/2022 Pukul 19.30

<https://dlh.ponorogo.go.id/kegiatan Dinas/> / diakses pada tanggal 10 oktober 2023

<https://dlh.ponorogo.go.id/Masyarakat/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

<https://dlh.ponorogo.go.id/profil/tpa/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

<https://kbbi.web.id/daurulang> diakses 1/9/2022

<https://ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 15 oktober 2023

